

**PENGARUH FLUKTUASI HARGA CPO DI PASAR
GLOBAL TERHADAP HARGA MINYAK GORENG SAWIT
DI DALAM NEGERI**

TESIS

**Hasbullah
NPM : 0606037084**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
SALEMBA
JANUARI, 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Hasbullah
Tempat/Tanggal Lahir : Bontosanra/Sul-Sel, 7 Mei 1964
NPM : 0606037084
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Fluktuasi Harga CPO (*Crude Palm Oil*) di Pasar Global Terhadap Harga Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

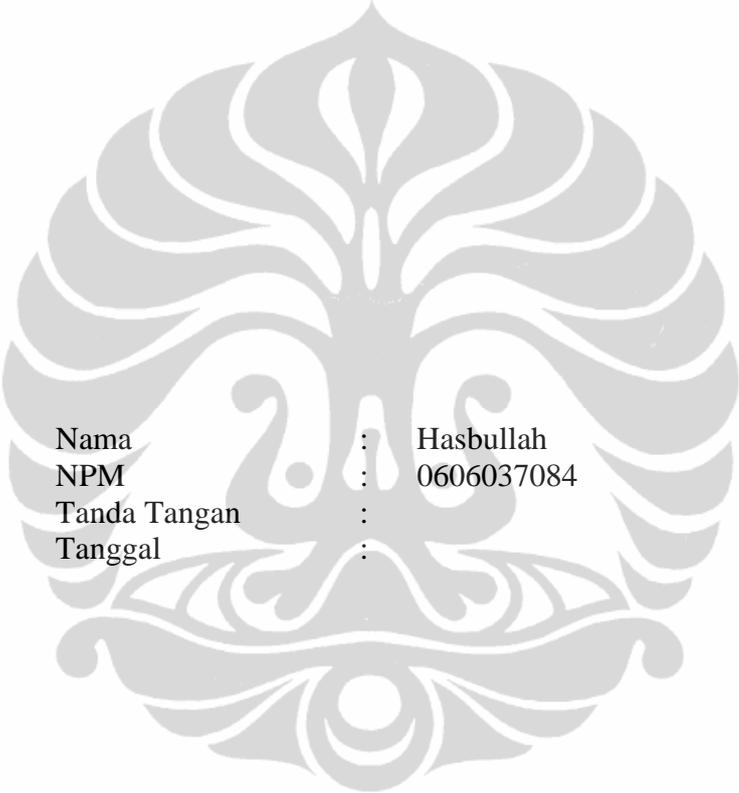
Pembimbing : Prof. Dr. Lepi T. Tarmidi ()
Penguji : Hera Susanti, SE. MSc. ()
Penguji : R.H. Achmadi, SE., M.Soc.Sc ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



Nama : Hasbullah
NPM : 0606037084
Tanda Tangan :
Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbullah
NPM : 0606037084
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH FLUKTUASI HARGA CPO (CRUDE PALM OIL) DI PASAR
GLOBAL TERHADAP HARGA MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM
NEGERI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :

Yang Menyatakan

(Hasbullah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	7
1.6 Kerangka Analisis.....	8
1.7. Kerangka Analisa Persamaan Simultan	10
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	11
2.1 Teori Perdagangan Internasional.....	11
2.2 Keunggulan Kompetitif	13
2.3 Pajak Ekspor	16
2.4 Teori Permintaan dan Barang Substitusi	20
3. PRODUKSI DAN PERDAGANGAN CPO INDONESIA , 1997 – 2006.....	21
3.1 Luas Areal Perkebunan	21
3.2 Pabrik Kelapa Sawit	23
3.3 Produksi CPO	23
3.4 Konsumsi CPO dalam Negeri	25
3.5 Ekspor CPO	26
3.6 Pangsa Pasar CPO Indonesia & Malaysia	28
3.7 Pengembangan Industri Hilir	30
3.8 Kebijakan Pemerintah Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit	34
3.9 Permasalahan	38
4. METODOLOGI DAN PEMBENTUKAN MODEL	42
4.1. Pengumpulan Data.....	42
4.2 Metodologi dan Pembentukan Model	44
4.3 Hasil Identifikasi Persamaan Simultan.....	48
5. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	50
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	58
REFERENSI DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	



.....
”*sekali layar terkembang
pantang biduk
surut ke pantai*”
.....

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Hal
2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keunggulan Kompetitif Sebuah Negara.....	15
2.2. Pengaruh Penerapan Pajak Ekspor Pada Negara Eksportir & Importir.....	17
3.1 Luas Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Kepemilikan Tahun 2006.....	21
3.2 Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Periode 1997-2006.....	22
3.3 Pertumbuhan Produksi CPO Indonesia Menurut Pengusahaan Tahun 1997 – 2006.....	24
3.4 Pertumbuhan Produksi, Konsumsi dan Ekspor CPO Tahun 1997-2006.....	25
3.5 Pohon Industri Kelapa Sawit	33
3.6 Perkembangan Harga CPO Dunia (FOB).....	35
3.7 Saluran Pemasaran CPO di Dalam Negeri & di Luar Negeri.....	39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

		Hal
Lampiran 1.	Data Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	xiv
Lampiran 2.	Hasil Pengolahan Data Persamaan Simultan.....	xviii
Lampiran 3.	Perkembangan Harga Eceran Minyak Goreng di Indonesia Tahun 1991-2007.....	xix
Lampiran 4.	Luas Kebun dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Sesuai Kepemilikan Tahun 1997-2006.....	xx
Lampiran 5.	Volume dan Nilai Ekspor CPO Indonesia Tahun 1997-2006.....	xxi
Lampiran 6.	Harga Rata-Rata CPO Indonesia (Domestik dan Ekapor) Tahun 1997-2006.....	xxii
Lampiran 7.	Harga Rata-Rata CPO Indonesia (Domestik dan Ekapor) Tahun 1997-2006.....	xxiii
Lampiran 8.	Grafik Harga Rata-rata CPO Domestik Indonesia Tahun 1997-2006.....	xxiv
Lampiran 9.	Grafik Harga Rata-rata CPO Ekspor Indonesia Tahun 1997-2006.....	xxv
Lampiran 10.	Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Minyak Goreng dan Industri Oleochemical Indonesia Tahun 2007	xvi
Lampiran 11.	Produksi 17 Minyak Nabati dan Lemak Dunia Tahun 2006.....	xxvii
Lampiran 12.	Negara-negara Produsen Utama CPO Dunia Tahun 1997-2006.....	xxviii

DAFTAR TABEL

	Hal
3.1. Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Nilai Ekspor CPO Indonesia Tahun 1997-2006	26
3.2. Lima Besar Negara Tujuan Ekspor CPO Indonesia Tahun 2002-2006	27
3.3. Produksi Minyak Nabati Dunia Tahun 2002-2006	28
3.4. Perbandingan Produksi dan Volume Ekspor CPO Indonesia dan Malaysia Tahun 2001-2006	29
3.5. Pangsa Pasar CPO Dunia Tahun 2006.....	30
3.6. Pertumbuhan Konsumsi Minyak Goreng (Minyak Goreng Kelapa dan Minyak Goreng Kelapa Sawit) Tahun 1999-2006	32
3.7. Harga Rata-Rata Minyak Goreng dan Harga CPO Tahun 1997-2006	34
3.8. Kebijakan Pemerintah untuk Stabilisasi Harga CPO dan Minyak Goreng Tahun 1997-2006	37
3.9. Keputusan Pemerintah Terhadap Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor (PE) CPO Tahun 1997-2006.....	41

ABSTRAK

Nama : Hasbullah
Program Studi : 0606037084
Judul : Pengaruh Fluktuasi Harga CPO di Pasar Global Terhadap Harga Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri

Tesis ini membahas pengaruh beberapa faktor yang berkaitan dengan CPO sebagai bahan baku minyak goreng sawit yang mempengaruhi harga minyak goreng sawit. Faktor-faktor tersebut diantaranya, pajak ekspor CPO, harga CPO di pasar internasional dan volume ekspor CPO serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi seperti, tingkat suku bunga kredit, PDB dan Exchange rate atau nilai tukar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut di atas secara serempak mempunyai pengaruh terhadap fluktuasi harga minyak goreng sawit di dalam negeri dengan tingkat sensitifitas yang berbeda-beda. Penelitian ini adalah memakai persamaan simultan dan diestimasi dengan metode *Two Stage Least Squares (2 SLS)*.

Kata kunci : harga minyak goreng sawit, pajak ekspor, harga CPO, ekspor CPO

ABSTRACT

The thesis discusses many factors of Crude Palm Oil as a raw materials of palm cooking oil that affect the price of domestic palm cooking oil. The factors such as CPO export tax, CPO international price, CPO export volume and factors of macro economic condition (interest rate, PDB and exchange rate). The research conclude the factors affect fluctuation on domestic palm cooking oil price in various sensitivity level. The research used simultant equation and estimation of the Two-Stage Least Squares method (2SLS).

Keyword : Palm cooking oil price, export tax, CPO price, CPO export.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) bagi Indonesia merupakan komoditi yang sangat strategis, karena CPO merupakan komoditi ekspor non minyak dan gas yang penting dalam menghasilkan devisa bagi negara, dimana pada tahun 2006 menghasilkan nilai ekspor US \$ 4,8 miliar. Selain itu, CPO juga dipakai sebagai bahan baku minyak goreng dan produk turunan lainnya yang digunakan untuk konsumsi baik untuk industri maupun masyarakat. Pemerintah Indonesia memasukkan minyak goreng sebagai komoditi yang penting karena termasuk dalam sembilan kebutuhan pokok, sehingga ketersediaannya dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi, stabilitas politik dan sosial keamanan negara (Brodjonegoro, 2005 hal 86).

Dengan peran ganda yang melekat pada minyak kelapa sawit tersebut, maka kebijakan industri CPO sarat dengan intervensi pemerintah. Di satu sisi ingin selalu memperlakukannya sebagai komoditi ekspor yang mendatangkan devisa bagi negara dan di sisi lain dihadapkan kepada kepentingan domestik dalam rangka stabilisasi pasar, khususnya sebagai kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri.

Minyak goreng baik minyak goreng sawit maupun minyak goreng kelapa merupakan salah satu kebutuhan pokok yang konsumsinya selalu meningkat. Menurut laporan dari informasi perdagangan komoditi berjangka, pada tahun 1997 konsumsi minyak goreng perkapita penduduk Indonesia baru mencapai rata-rata 12 kg maka pada tahun 2007 naik menjadi 17 kg. Kenaikan konsumsi minyak goreng tersebut diikuti dengan pergeseran porsi konsumsi yaitu menjadi minyak goreng kelapa sawit 82 % dan minyak goreng kelapa 18 %. Kecenderungan konsumen menggunakan minyak goreng berasal dari kelapa sawit selain pertimbangan ekonomis yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, juga mengandung komponen gizi

yang lebih beragam dan dari aspek kesehatan pun kandungan kolesterolnya relatif rendah (Yan Fauzi, *et al* 2007).

Perubahan pola konsumsi masyarakat ini mendorong peningkatan permintaan terhadap CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit, sekitar 29 % dari total produksi dalam negeri dikonsumsi untuk kebutuhan pasar domestik dan porsi terbesar adalah sebagai bahan baku minyak goreng. Selain itu dipakai pula sebagai bahan baku industri non pangan seperti kosmetik, shampo, *lotion* dan sabun, juga termasuk bahan baku deterjen dan minyak pelumas. Sementara itu, kebutuhan CPO di dunia internasional juga semakin meningkat karena selain dibutuhkan sebagai bahan pangan, beberapa tahun terakhir dipakai pula sebagai bahan baku biodiesel.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang terus bertambah maka secara simultan diikuti pula dengan semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1980 luas lahan perkebunan sawit baru mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton, maka dalam jangka waktu 25 tahun kemudian luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 6,6 juta Ha dengan total produksi CPO pada tahun 2006, sebanyak 16,5 juta ton. (Dirjen Perkebunan, 2007 hal 3).

Dari sisi produksi Indonesia bersama Malaysia merupakan negara produsen dan pengeksport CPO terbesar di dunia, mencapai hingga 35 juta ton / tahun atau 85 % dari total ekspor dunia. Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif bila dibandingkan dengan produsen CPO lainnya, karena ketersediaan lahan yang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga produksinya masih bisa ditingkatkan dan pada akhirnya akan mengalahkan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar.

Sedangkan Cina, kini merupakan konsumen terbesar CPO di dunia di samping negara-negara Uni Eropa dan India. Perhatian Uni Eropa yang begitu besar terhadap isu lingkungan hidup membutuhkan energi alternatif yang ramah lingkungan turut mendorong permintaan akan CPO. Jerman misalnya, terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk biodiesel sebagai bahan bakar alternatif dan berhasil menjadi produsen biodiesel terbesar dengan jumlah produksi lebih dari 1 juta ton pertahun (Kadiman K., 2005 hal 113). Kenaikan

permintaan CPO di beberapa negara karena juga dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak mentah (BBM), sehingga seperti disampaikan di atas banyak negara melakukan penggunaan CPO sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar crude oil. Selain itu komoditi substitusinya juga menunjukkan tren produksinya selama beberapa tahun terakhir menurun seperti minyak kedelai, minyak lobak dan minyak matahari, demikian pula dengan produksi jagung yang konsumsinya meningkat akibat dari permintaan pakan ternak yang sebelumnya dipakai sebagai bahan baku untuk produksi etanol dan bio gas akhirnya beralih ke CPO. Tarik menarik antara kebutuhan industri pangan dan non pangan, pakan dan bahan bakar menyebabkan ketersediaan CPO menjadi sangat strategis.

Pertumbuhan produksi CPO Indonesia juga dihadapkan kepada persoalan pandangan atau paradigma global yang mengalami perubahan terhadap pengertian pembangunan yang berkelanjutan, karena tidak jarang dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit pengusaha cenderung melakukan pembakaran hutan. Untuk mengantisipasi tuntutan global tersebut perusahaan melakukan *community development* sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertumbuhan produksi CPO dunia relatif lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsinya, dalam kondisi normal seharusnya tidak mendorong kenaikan harga CPO di pasar internasional. Diperkirakan akibat dari derasnya permintaan CPO di pasar global menyebabkan produsen CPO domestik lebih memilih melakukan ekspor dibandingkan dengan menjualnya di pasar domestik untuk bahan baku industri minyak goreng. Dampaknya adalah terjadinya kekurangan bahan baku dari beberapa pabrik pengolahan minyak goreng di dalam negeri.

Untuk menghindari terjadinya kelangkaan pasokan CPO di dalam negeri maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan baik yang menyangkut sistim produksi maupun mekanisme distribusinya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen di dalam negeri dan sekaligus tidak akan merugikan produsen dan pelaku usaha di sektor industri kelapa sawit. Kebijakan tersebut diantaranya meningkatkan pajak ekspor CPO dari 3 % hingga 60 % untuk pengendalian ekspor CPO, sedangkan untuk

pengendalian harga minyak goreng sawit meliputi stabilisasi harga melalui operasi pasar, subsidi langsung kepada industri pengolahan minyak goreng, dan subsidi kepada konsumen tertentu.

Kebijakan peningkatan pajak ekspor CPO akan berdampak pada penurunan pangsa ekspor akibat menurunnya daya saing industri, penurunan harga TBS, pemiskinan petani dan terhambatnya upaya peningkatan produktivitas lahan sawit. Pengembangan industri hilir melalui instrumen peningkatan pajak ekspor tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dan insentif investasi, serta dapat mengancam terjadinya involusi industri hulu, menciutnya kesempatan kerja dan penerimaan negara (Sugema et al, 2007 hal 31).

Oleh karena itu dalam upaya mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir maka Pemerintah harus mengambil alternatif kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan memberikan nilai tambah ekonomi dan *multiplier effect* yang luas, bukan kebijakan yang sifatnya partial atau *ad hoc*.

1.2 Rumusan Masalah

Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri karena meningkatnya permintaan, yaitu untuk kepentingan konsumsi sebagai bahan baku industri minyak goreng dan untuk bahan baku antara industri. Permintaan yang tinggi yang tidak langsung direspon dengan tambahan suplai maka dalam jangka pendek akan menyebabkan penurunan produksi di pabrik pengolahan. Penurunan produksi minyak goreng sawit akan mendorong kenaikan harga minyak goreng sawit, oleh karena itu maka dirumuskan beberapa hal :

1. Berapa besar pengaruhnya terhadap harga minyak goreng sawit jika harga bahan baku minyak goreng tersebut dalam hal ini CPO mengalami lonjakan di pasar internasional maupun untuk pasar domestik ?.
2. Bagaimana besarnya pengaruh dari kenaikan harga CPO di luar negeri terhadap jumlah CPO yang diekspor sehingga menimbulkan kekurangan persediaan bahan baku minyak goreng sawit di dalam negeri ?.

3. Seberapa efektif langka-langka kebijakan pengendalian yang dilakukan pemerintah apabila terjadi lonjakan harga minyak goreng sawit di dalam negeri ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pengaruh kenaikan harga CPO di pasar global terhadap harga minyak goreng sawit di dalam negeri.
2. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng sawit di dalam negeri.
3. Menganalisis pengaruh beberapa kondisi makro ekonomi dalam mata rantai industri CPO dari hilir hingga hulu (suku bunga kredit, PDB, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US \$).

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah berupa studi literatur, pengolahan data sekunder dan analisa hasil dengan metoda persamaan simultan. Hasil pengolahan data dibandingkan dengan dasar teori dan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, dan selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

Penelitian oleh Djaenuddin D & Goenarsyah I. (2002 39), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng sawit domestik dengan melakukan regresi terhadap beberapa variabel bebas yaitu; harga ekspor minyak goreng sawit (HEMGS), harga CPO (HCPO), harga minyak goreng sawit kelapa (HMGK) di domestik dan stok minyak goreng dalam negeri (SMG) pada tahun sebelumnya. Model regresi penelitian tersebut yaitu :

$$\text{HMGD} = \beta_0 + \beta_1 \text{SMG} + \beta_2 \text{HCPO} + \beta_3 \text{HXMGS} + \beta_4 \text{HMGK} + e$$

Hasil regresi Djaenuddin D. dan Goenarsyah I. (2002 hal 40), diperoleh hasil bahwa harga minyak goreng sawit di dalam negeri cenderung lebih dipengaruhi oleh harga ekspor minyak goreng sawit atau kondisi pasar minyak goreng sawit di luar negeri. Sementara harga minyak goreng kelapa dan stok minyak goreng serta harga minyak sawit (CPO) tidak begitu signifikan mempengaruhi harga minyak goreng sawit di dalam negeri.

Pada penelitian ini juga akan dianalisis harga minyak goreng sawit di dalam negeri (HMG) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terkait langsung dengan kondisi minyak goreng sawit itu sendiri atau variabel yang tidak berhubungan langsung dengan minyak goreng sawit tetapi sangat erat hubungannya dengan faktor yang berhubungan dengan bahan baku minyak goreng sawit yaitu CPO.

Harga minyak goreng sawit dalam negeri ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan minyak goreng sawit itu sendiri, atau dengan kata lain ditentukan oleh besarnya produksi dan konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakat, maka fungsi dari harga minyak goreng sawit adalah :

$$\text{Harga MG} = f \{ \text{Produksi, Konsumsi dan Income masyarakat} \} \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan kemampuan suplai minyak goreng sawit atau produksi sangat tergantung dengan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku. Kapasitas suplai minyak goreng sawit dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti suku bunga kredit investasi. Selain itu produsen juga sangat mempertimbangkan harga minyak goreng itu sendiri dalam memproduksi minyak goreng sehingga fungsi produksi minyak goreng adalah :

$$\text{Pr MG} = f \{ \text{Harga CPO DN, Harga MG, Interest Rate, Ekspor CPO} \} \dots\dots\dots (2)$$

Ketersediaan CPO dalam negeri sangat dipengaruhi oleh produksi CPO dan permintaan pasar internasional. Permintaan pasar luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan harga CPO itu sendiri di luar negeri serta harga komoditas substitusinya. Indonesia dalam posisi sebagai produsen CPO terbesar di dunia dihadapkan kepada pilihan apakah akan memprioritaskan permintaan dalam negeri atau menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemerintah menganggap CPO ini menjadi komoditi strategis maka kebijakan pengendalian pasar menjadi pilihan kebijakan yang dianggap cukup memadai untuk mengatur pemenuhan kebutuhan pasar dengan menerapkan kebijakan pajak ekspor. Penawaran CPO ke pasar internasional juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap

mata uang asing dalam hal ini Dollar Amerika (US \$). Sehingga ekspor CPO adalah fungsi dari beberapa variabel :

$$X_{CPO} = f \{ \text{Harga CPO LN, Pajak Ekspor CPO, Exchange Rate} \} \dots \dots \dots (3)$$

Dari ketiga fungsi tersebut di atas maka variabel yang akan dianalisis tidak hanya mencakup kondisi mikro dari minyak goreng sawit maupun bahan bakunya, namun akan dianalisis lebih jauh tentang pengaruh kondisi makro ekonomi seperti suku bunga kredit investasi yang erat kaitannya dengan penyediaan sarana pengolahan industri hilir. Demikian pula tingkat pendapatan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap daya beli sebagai konsumen akhir dari minyak goreng sawit dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap US \$ turut menjadi pertimbangan produsen dalam melakukan transaksi perdagangan ke pasar internasional.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas maka penelitian ini dibuat dalam bentuk persamaan simultan sebagaimana tertuang lebih lengkap pada uraian BAB 4 Metodologi.

1.5 Ruang Lingkup

Masing-masing variabel dalam penelitian ini akan menggunakan data dengan rentan waktu tertentu (*time series*) atau data bulanan, yaitu sejak bulan Januari 1997 hingga bulan Desember 2006. Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Perum BULOG, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Perum BULOG, Kantor Pemasaran Bersama PT. Perkebunan Nusantara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, serta sumber-sumber publikasi lainnya.

Penelitian ini mencakup harga minyak goreng sawit di dalam negeri dimana minyak goreng kelapa tidak termasuk dalam bahasan ini walau tingkat konsumsinya masih relatif signifikan. CPO yang dimaksud adalah seluruh produksi dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang merupakan minyak sawit mentah dan minyak sawit lainnya, tidak termasuk minyak biji sawit (Palm Kernel Oil/PKO).

Rentan waktu selama sepuluh tahun 1997-2006, dianggap mempunyai keragaman yang cukup sehingga seluruh kondisi sudah mampu memberikan gambaran komprehensif dari dinamika yang dialami oleh variabel yang akan dianalisa. Seperti fluktuasi harga minyak goreng sawit dan CPO, kenaikan produksi CPO dan peningkatan permintaan CPO baik domestik maupun luar negeri serta besaran dari pajak ekspor CPO yang sering berubah-ubah.

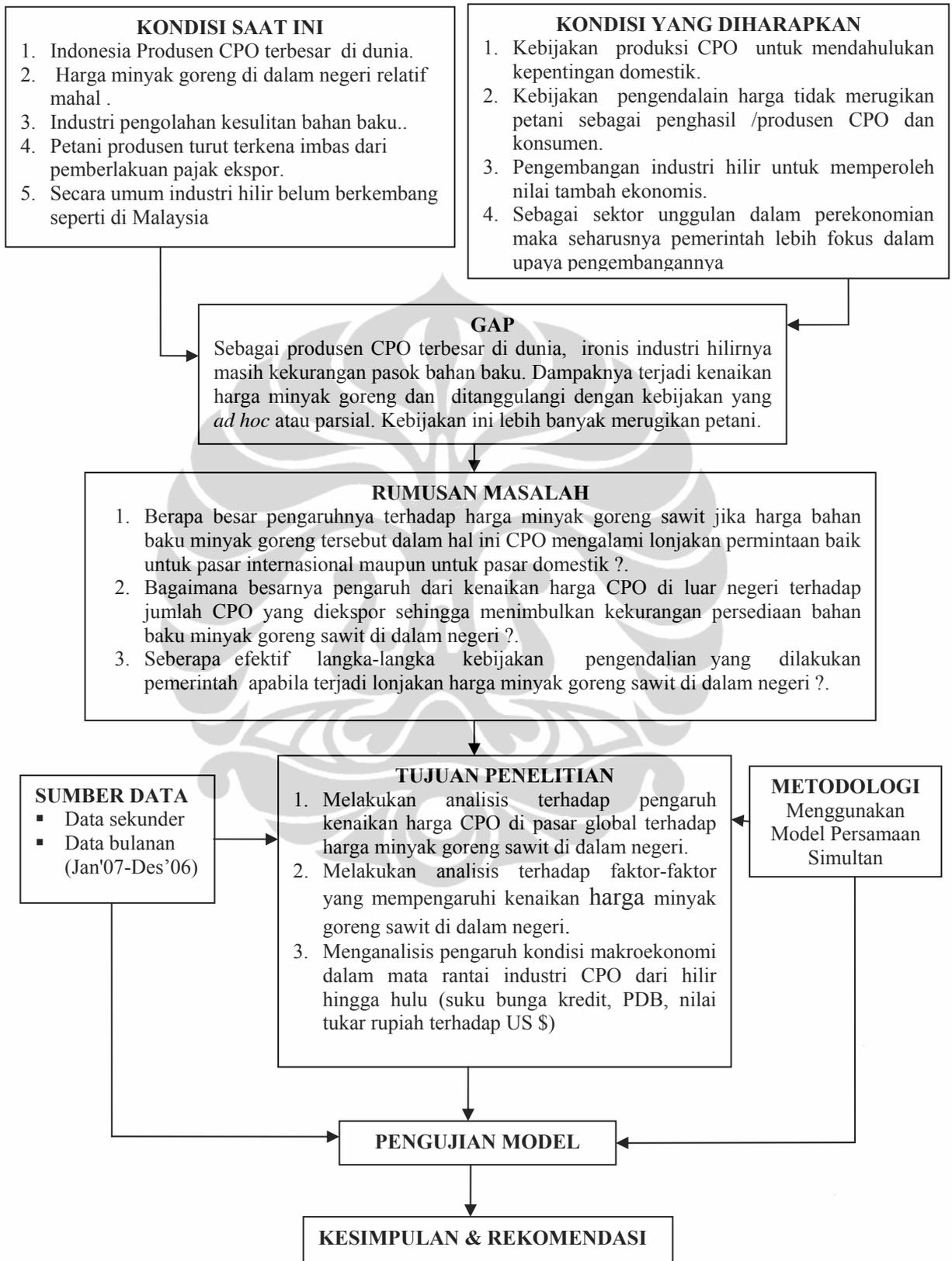
Kondisi makro ekonomi pada periode tersebut juga sangat berfluktuatif sebagai imbas pasca krisis moneter tahun 1997-1998, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan pada kondisi finansial dalam negeri seperti tingginya suku bunga kredit investasi, nilai tukar mata uang yang tidak stabil serta penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari penurunan income karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pajak Ekspor dalam analisa ini dibuat dalam bentuk variabel Dummy, karena variabel tersebut sifatnya kualitatif (Gujarati D.N. 2003 hal 297) . Variabel Dummy dibuat menjadi dua kategori, yakni apabila pajak ekspor tersebut nilainya lebih besar atau sama dengan 5 % diberi notasi 1 dan apabila prosentase pajak ekspor tersebut lebih kecil dari 5 % maka diberi notasi 0.

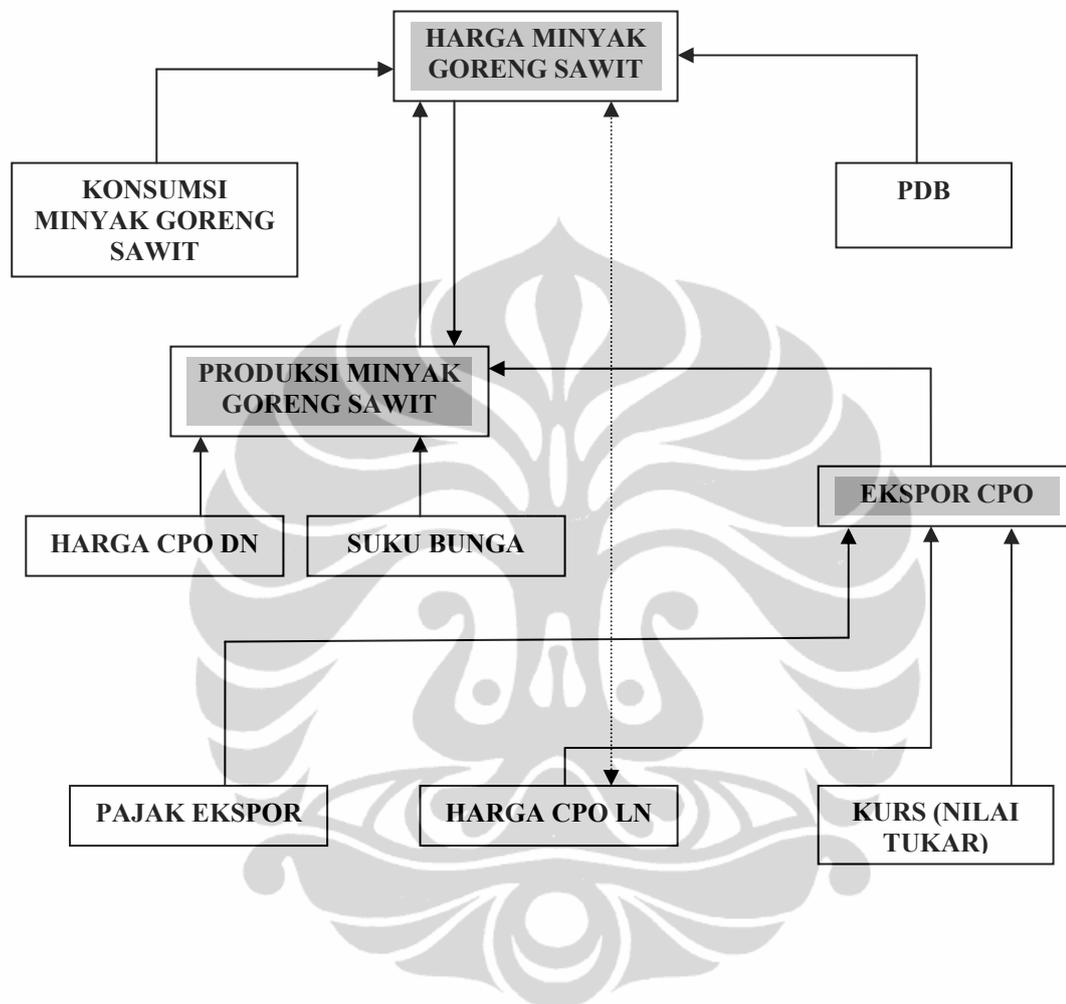
Harga CPO memakai data bulanan dari harga rata-rata CPO di bursa Rotterdam. Patokan harga tersebut menjadi acuan pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar internasional.

Harga minyak goreng sawit yang dipakai dalam analisa ini adalah data harga bulanan minyak goreng sawit curah yang dimonitor perkembangan harganya pada setiap bulan di beberapa kota pencatatan inflasi di seluruh Indonesia. Sedangkan data produksi minyak goreng sawit adalah data yang dihimpun dari seluruh pabrik pengolahan minyak goreng sawit dan data konsumsi dihitung dari rata-rata konsumsi minyak goreng sawit perkapita pertahun dikali dengan total jumlah penduduk.

1.6. Kerangka Analisa



1.8 Kerangka Analisis Persamaan Simultan



Keterangan : Variabel endogen → 

Variabel exogen → 

BAB 2

KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa maupun faktor-faktor lain yang melewati perbatasan suatu negara, dan memberikan dampak terhadap perekonomian domestik maupun global (Markusen, 1995). Setiap negara melakukan perdagangan internasional dilandasi motivasi untuk memperoleh keuntungan perdagangan (*gains from trade*). Perdagangan dapat terwujud karena masing-masing negara memiliki perbedaan dalam memproduksi suatu barang. Dorongan untuk melakukan perdagangan juga karena diawali tujuan untuk memproduksi suatu barang hingga mencapai skala ekonomi (*economics of scale*). Sebuah negara jika membatasi kegiatan produksinya hanya untuk menghasilkan barang tertentu saja dan negara tersebut memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya maka negara tersebut akan menghasilkan barang-barang dengan skala yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan apabila negara tersebut memproduksi berbagai jenis barang (Krugman & Obstfeld 2000, hal 15). Teori perdagangan ini didasarkan kepada ide bahwa penentuan pola perdagangan internasional adalah sumbangan relatif dari faktor produksi suatu negara pada waktu tertentu. Jika suatu negara menawarkan faktor produksi berupa tenaga kerja dalam jumlah yang relatif melimpah dibandingkan modal, maka negara tersebut akan mengekspor barang yang diproduksi dengan padat karya dan begitu pula sebaliknya (Gandolfo G., 1998. 67-69).

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa perdagangan bebas antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisit neraca perdagangan bagi mitra dagangnya. Adam Smith pada dasarnya menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan kedua belah pihak karena masing-masing negara akan lebih mengkonsentrasikan diri untuk memproduksi barang-barang

yang mempunyai keunggulan mutlak (*absolut advantage*) kemudian mengekspor kelebihan barang yang diproduksinya kepada mitra dagangnya.

Tarmidi (2000), perdagangan internasional dapat terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya, negara tersebut tidak bisa memproduksi sendiri, dalam rangka memperoleh keuntungan dari perdagangan, adanya perbedaan biaya produksi dalam memproduksi, negara memproduksi barang yang berlebih, perbedaan dalam penguasaan teknologi, kebutuhan dalam negeri, adanya ketergantungan politik, adanya perusahaan multinasional dan melakukan diferensiasi produk (barang produksi sama diberi kesan berbeda, intra industri trade).

Perdagangan internasional akan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Salvatore 2004, hal 207) jika :

1. Perdagangan internasional dapat menyebabkan tercapainya kondisi *full utilization* dari semua faktor produksi. Melalui perdagangan internasional negara yang ekonominya masih dalam taraf berkembang akan bergeser dari proses produksi yang tidak efisien menuju proses produksi yang efisien.
2. Dengan perdagangan internasional maka akan terjadi penambahan output ke pasar sehingga produsen akan memproduksi komoditi sampai tercapainya *economies of scale*.
3. Melalui perdagangan internasional akan terjadi transmisi antar negara berupa penggunaan teknologi baru dan ide-ide yang cemerlang.
4. Seiring dengan berlangsungnya perdagangan internasional maka akan terjadi pula perpindahan modal atau aliran dana dari negara yang ekonominya maju kepada negara yang ekonominya masih berkembang.
5. Dan pada beberapa negara, perdagangan internasional juga dapat mendorong munculnya permintaan domestik.

Sebuah negara dapat memperbaiki kinerja ekonominya apabila senantiasa menempuh kebijakan perdagangan strategis (*strategic trade policy*). Kebijakan perdagangan strategis yaitu pemerintah secara aktif mempromosikan ekspor dan menekan impor pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan perdagangan strategis

untuk negara maju dan negara berkembang berbeda, untuk negara maju promosi ekspornya cenderung kepada komoditi yang berteknologi tinggi sementara negara berkembang lebih banyak melakukan promosi ekspor yang mengandalkan komoditi yang berasal keunggulan dari sumber daya alam yang dimilikinya. Sedangkan kebijakan ke dalam bagi negara berkembang yang sedang tumbuh industrinya lebih banyak kepada kebijakan substitusi impor (Paul & Krugman, 2005, hal 345).

Ekonom Klasik dan Neo Klasik percaya bahwa perdagangan internasional merupakan pendorong positif pembangunan ekonomi melalui tiga cara. Yaitu, pertumbuhan ekonomi akan cepat terdorong jika ekonomi menjalankan strategi produksi yang berorientasi keluar, dalam bentuk promosi ekspor. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan lebih terstimulasi jika impor barang yang dilakukan merupakan barang antara yang mendukung strategi promosi ekspor. Dan terakhir perdagangan yang dijalankan harus mendorong penyebaran pengetahuan ditandai dengan meningkatnya produktivitas perekonomian domestik (Parningotan FS, 2007).

Dalam kaitan dengan industri pengolahan CPO khususnya industri oleochemical yang memproduksi bahan baku antara untuk industri non pangan hendaknya diproteksi dengan tidak mengimpor bahan baku oleochemical tetapi dengan mengembangkan industri pengolahan tersebut yang ketersediaan bahan bakunya berupa CPO dapat dijamin kontinuitas suplainya dari dalam negeri sendiri.

2.2 Keunggulan Kompetitif

Perdagangan internasional suatu bangsa yang belakangan ini marak dengan persaingan antar negara atau global secara ketat khususnya dalam memperebutkan pangsa pasar dan terutama terjadi pada negara-negara berkembang. Michael Porter (1990, hal 71), mengemukakan bahwa tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi yaitu sumberdaya alam yang melimpah dan sumberdaya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Selanjutnya dalam studinya Porter menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat

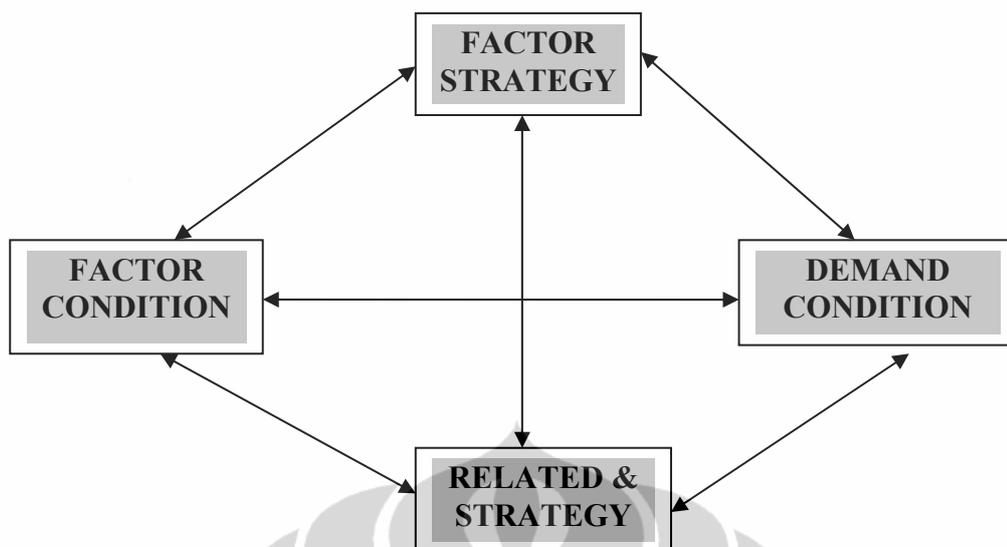
mendukung dalam peningkatan daya saing selain adanya faktor produksi yang tersedia.

Keunggulan bersaing suatu bangsa dengan bangsa lain termasuk dalam perdagangan internasional ditentukan oleh empat faktor yaitu sebagai berikut yaitu :

1. Keadaan faktor-faktor produksi. Yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara meliputi: sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan, sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta prasarana.
2. Kondisi permintaan. Permintaan sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang keunggulan daya saing, dan kondisi permintaan dimaksud meliputi; konsumsi dalam negeri, skala dan jumlah permintaan dalam negeri, pertumbuhan pasar, dan tren permintaan pasar internasional.
3. Eksistensi industri terkait dan pendukung yang kompetitif secara internasional. Keberadaan industri pendukung adalah untuk menjaga hubungan antara produsen dan pemasok serta mempertahankan nilai-nilai hubungan yang saling menguntungkan.
4. Strategi perusahaan. Yaitu strategi yang menyangkut struktur kelembagaan dan permodalan serta kondisi persaingan. Kondisi persaingan termasuk persaingan antar perusahaan di dalam negeri.

Dengan demikian maka semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara dan semakin besar permintaan domestik, serta semakin banyak industri pendukung atau pelengkap di suatu negara dan semakin tinggi tingkat persaingan perusahaan di negara tersebut, maka semakin kuat daya saing negara itu di tingkat internasional. Selain keempat faktor tersebut, keunggulan kompetitif nasional juga masih dipengaruhi oleh faktor insidental seperti adanya penemuan baru, melonjaknya harga, terjadi perubahan kurs dan konflik keamanan antar negara.

Bagaimana keempat faktor ini saling berinteraksi, saling bergantung dan saling mempengaruhi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar : 3. 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Kompetitif sebuah Negara

Sumber : Competitive Advantage, Michael E. Porter

Selanjutnya Porter mengatakan bahwa ada tiga kelompok faktor yang menentukan tingkat daya saing sebuah negara yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan-persyaratan dasar yang dianggap menjadi motor dasar penggerak proses pertumbuhan ekonomi yang meliputi kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, kondisi makro ekonomi serta tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi seperti kualitas sumber daya manusia yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan pelatihan, kinerja pasar yang efisien dan kesiapan teknologi di tingkat nasional maupun perusahaan secara individu.
3. Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan inovasi dan kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan secara bersama menentukan tingkat inovasi sebuah negara.

Pada perkebunan kelapa sawit dan produksi yang dihasilkannya berupa CPO dan produk turunannya merefleksikan perpaduan dari keempat faktor yang disebutkan M. Porter di atas. Sebagai negara agraris yang mempunyai iklim

tropis mencerminkan kondisi sumber daya alam yang sangat mendukung untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar menjadi pasar yang sangat potensial, di samping itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada negara-negara yang tidak memproduksi CPO.

Keunggulan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditopang pula oleh industri terkait yang terintegrasi mulai dari hulu (*on farm*) seperti penyediaan benih unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya sampai industri hilir (*off farm*), seperti pengolahan kelapa sawit dan turunannya serta industri akhir yaitu pengolahan minyak goreng berbahan baku CPO dan industri oleochemical.

2.3 Pajak Ekspor

Pajak ekspor adalah pajak yang dibebankan kepada barang ekspor atau biasa disebut dengan pungutan ekspor. Besaran tarif yang ditetapkan dalam menghitung pajak ekspor menjadi dibagi menjadi tiga yaitu (Salvatore 2004, hal 236) :

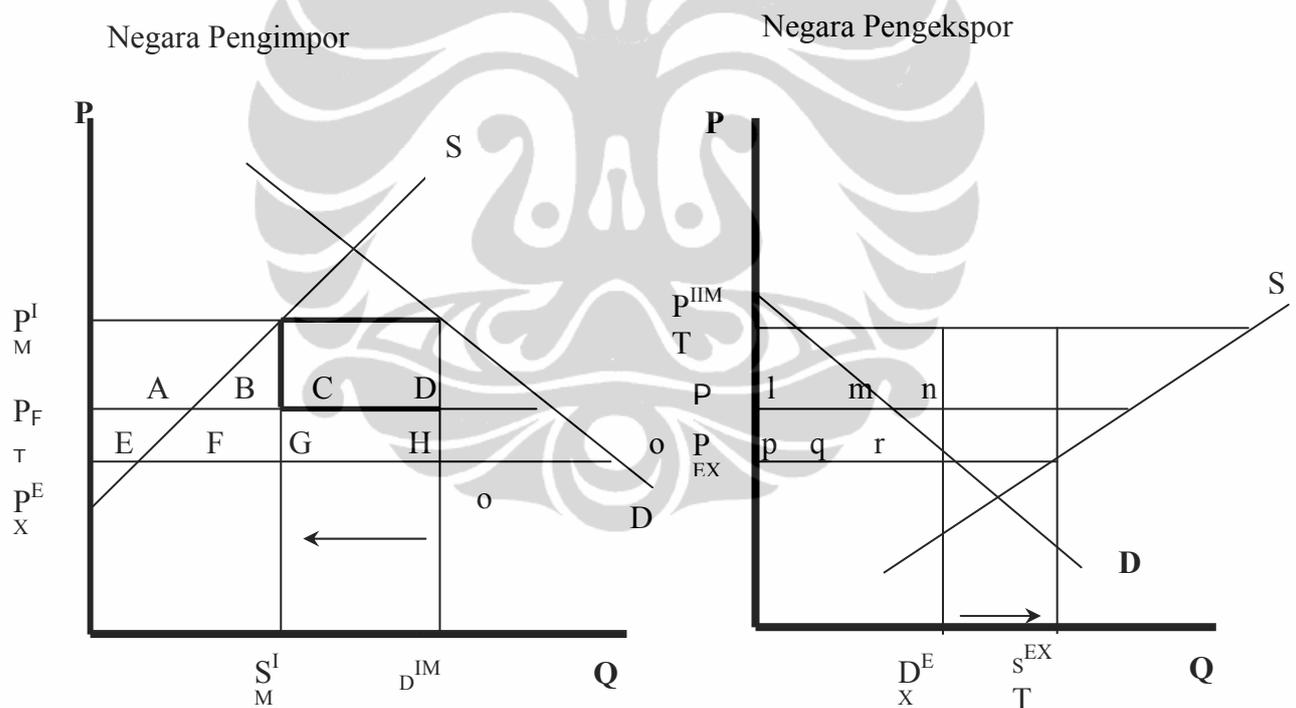
1. *Ad valorem tariff*, adalah persentase tarif yang ditetapkan terhadap nilai komoditas yang diperdagangkan.
2. *Specific tariff*, adalah jumlah tarif yang ditetapkan terhadap setiap unit komoditas yang diperdagangkan.
3. *Compound tariff*, adalah kombinasi antara *Ad valorem* dan *Specific tariff*.

Tujuan utama dari penerapan pajak ekspor pada suatu komoditas khususnya komoditas pertanian adalah untuk menjamin kecukupan dan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga komoditas tersebut di pasar domestik.

Pemerintah suatu negara sering melakukan proteksi atau perlindungan sepihak kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomiannya terhadap pengaruh persaingan perdagangan global. Kebijakan bisa berupa perlindungan terhadap konsumen di dalam negeri dengan mengatur ekspor terhadap komoditi tersebut melalui penerapan pajak ekspor. Demikian pula sebaliknya agar komoditi tertentu di dalam negeri tidak mendapat persaingan

dari produk sejenis dari luar negeri maka juga diterapkan kebijakan pengaturan impor berupa penentuan kuota, tarif bea masuk dan subsidi langsung.

Oleh karena itu di negara-negara industri maju kebijakan tersebut jarang diterapkan seperti Amerika Serikat semenjak adanya *US Constitution* tidak lagi memperbolehkan adanya pajak ekspor. Lain halnya pada negara-negara berkembang yang berorientasi ekspor pada komoditas primer dan agrikultur, kebijakan ini masih biasa diterapkan. India, misalnya pada tahun 2000 masih menerapkan tarif pajak ekspor hingga di atas 50 % terhadap ekspor kayu, kulit dan karet. Brazil menerapkan pajak ekspor terhadap gula hingga 40 % dan Indonesia menerapkan pada ekspor CPO dan turunannya (Salvatore, 2004 hal 239)



Gambar 2.2
Pengaruh Penerapan Pungutan Ekspor pada Negara Eksportir dan Negara Importir

Sumber : Krugman P.R & Obstfeld (diolah)

Kebijakan pajak ekspor akan memberikan dampak ekonomi baik terhadap negara pengekspor maupun negara pengimpor, dampak tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2.

Pada kondisi sebelum adanya penerapan pajak ekspor atau perdagangan bebas baik di negara eksportir maupun importir tingkat harga komoditi tertentu pada level P_{FT} , dan jumlah komoditi yang diekspor atau diimpor adalah selisih antara penawaran dan permintaan pada masing-masing negara tersebut. Pada saat terjadi kelangkaan pasokan komoditi tersebut di pasar domestik, sehingga harga merangkak naik maka pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan menerapkan pajak ekspor terhadap komoditi tersebut. Pungutan ekspor yang relatif tinggi memberikan insentif negatif terhadap eksportir dan produsen di domestik sehingga memilih untuk menjual komoditas tersebut di dalam negeri, maka pasokan dalam negeri meningkat dan harga di pasar domestik pun akan turun menjadi P_{EX} dan jumlah barang yang disuplai meningkat menjadi S^{EX}_T .

Sebaliknya kekurangan pasok akibat diberlakukannya pajak ekspor yang relatif tinggi menyebabkan kelangkaan akan komoditi tersebut di pasar internasional khususnya negara importir, dan pengaruhnya sangat signifikan terhadap harga di pasar global sehingga meningkat mencapai harga P^{IM} serta barang yang disuplai ke pasar berkurang dari D^{IM}_T menjadi S^{IM}_T . Dampaknya adalah terjadi surplus konsumen pada negara eksportir sebanyak $k + l$ dan pemerintah kehilangan kesempatan memperoleh pajak sebanyak $m + q$. Sementara pada negara importir konsumen harus menderita kerugian akibat kenaikan harga karena suplai berkurang sebanyak $A+B$.

Pemberlakuan pajak ekspor cenderung menguntungkan konsumen di negara eksportir dan produsen di negara importir. Dan sebaliknya pihak yang dirugikan adalah produsen di negara eksportir serta konsumen pada negara importir.

Pajak ekspor dianggap mampu mengendalikan barang yang diekspor dalam rangka memenuhi kecukupan konsumen dalam negeri, tetapi harus memperhitungkan dengan besarnya kesempatan dalam memperoleh devisa negara. Sehingga penerapan kebijakan tersebut diperlukan analisa dengan membandingkan antara azas manfaat dan biaya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya distorsi baik pada tingkat konsumen maupun di tingkat produsen. Gejala harga beberapa komoditi pangan dan non pangan di pasar global belakangan ini, membuat beberapa negara melakukan kebijakan pembatasan

ekspor terhadap beberapa komoditi pangannya. Indonesia, misalnya menetapkan pungutan berupa pajak ekspor terhadap komoditas CPO dan turunannya. Pajak Ekspor terhadap CPO dan turunannya mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 1994, sebesar 30 % yang pada periode tersebut harga CPO di pasar global mencapai US \$ 600/Ton, Tahun 1997-1998 saat krisis ekonomi pajak ekspor dinaikkan hingga 60 %. Periode setelah krisis ekonomi berlalu pajak ekspor kembali kepada posisi 3 – 6 %. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan CPO dalam negeri khususnya sebagai bahan baku utama industri minyak goreng dan kesempatan memperoleh devisa akibat dari tingginya harga CPO di pasar global.

Kenaikan harga CPO di pasar global juga dipicu dari pengaruh kenaikan harga beberapa komoditi substitusinya seperti bahan bakar minyak mentah (*crude oil*), penurunan produksi pada minyak nabati dan lemak dunia serta penurunan produksi dari beberapa komoditi seperti jagung dan tebu pada beberapa negara. Komoditi substitusi dari CPO tersebut ketersediaanya cenderung mengalami penurunan sehingga harganya pun menjadi naik, dan konsumen pada akhirnya beralih kepada CPO. Tekanan permintaan yang relatif tinggi dibanding dengan ketersediaanya atau permintaan tidak mampu segera direspon dengan suplai yang cukup maka terjadi kenaikan harga CPO.

Kenaikan harga CPO tersebut oleh produsen dalam negeri disikapi dengan melakukan ekspor dalam volume yang relatif besar sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri khususnya untuk industri pengolahan minyak goreng sawit berkurang. Kekurangan bahan baku menyebabkan jumlah produksi minyak goreng sawit menurun. Kurangnya suplai minyak goreng sawit ke pasar mendorong harga minyak goreng sawit naik. Agar jumlah CPO yang diekspor dapat dikendalikan maka pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak ekspor CPO.

2.4. Teori Permintaan dan Barang Substitusi

Permintaan terhadap suatu barang akan meningkat apabila harga barang tersebut menurun demikian pula sebaliknya, apabila harga barang tersebut mengalami kenaikan maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun

dengan asumsi faktor lainnya dianggap tetap, oleh para ekonom menyebutnya hukum permintaan (Mankiw N.G.,1998 hal. 77). Faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang adalah pendapatan, jika permintaan terhadap suatu barang berkurang ketika pendapatan berkurang maka barang tersebut disebut barang normal (*normal good*). Permintaan terhadap suatu barang meningkat walaupun pendapatan menurun maka barang tersebut disebut barang inferior (*inferior good*).

Di samping itu permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh harga barang lain yang mempunyai kegunaan yang sama atau dapat saling menggantikan disebut barang substitusi dan atau saling melengkapi yang disebut barang komplementer. Selera atau cita rasa masing-masing individu serta ekspektasi atau perkiraan terhadap barang yang akan diminta pada masa mendatang atau ekspektasi terhadap pendapatan turut pula menjadi penentu dalam permintaan barang.

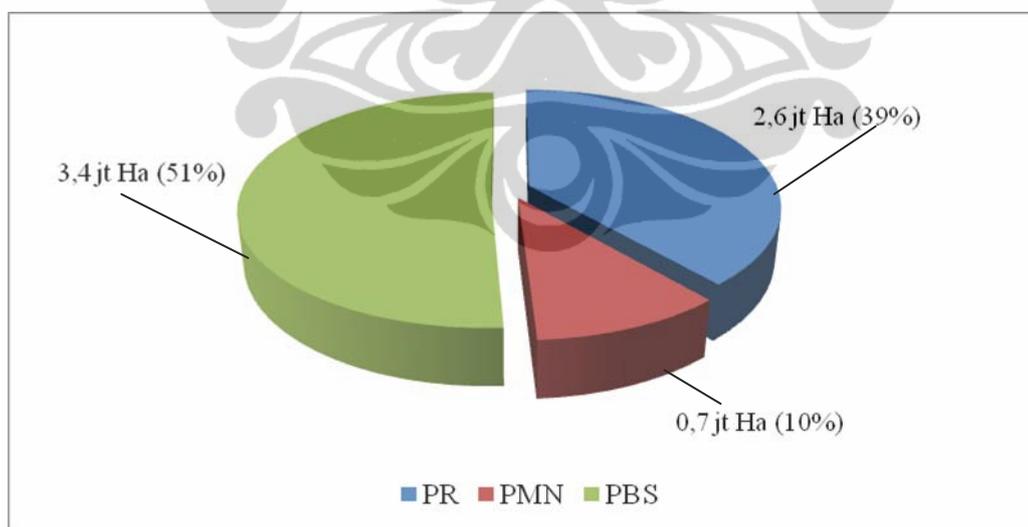
Berangkat dari hukum permintaan, dapat dijelaskan bahwa jumlah permintaan terhadap minyak goreng sawit di dalam negeri dipengaruhi oleh selain harga minyak goreng sawit itu sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh permintaan akibat perubahan harga dari bahan bakunya yakni CPO. Permintaan terhadap CPO selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri tetapi juga menjadi komoditi yang permintaannya sangat tinggi di pasar internasional. Di pasar internasional, keberadaan CPO sebagai sumber minyak nabati berkaitan erat pula dengan barang substitusinya yakni minyak kedelai (*soybean oil*) dan minyak biji matahari (*sunflowerseed oil*). Karena itu fluktuasi harga pada salah satu komoditas ini akan berpengaruh terhadap permintaan barang substitusinya.

BAB 3

PRODUKSI DAN PERDAGANGAN CPO DI INDONESIA, 1997– 2006

3.1 Luas Areal Perkebunan

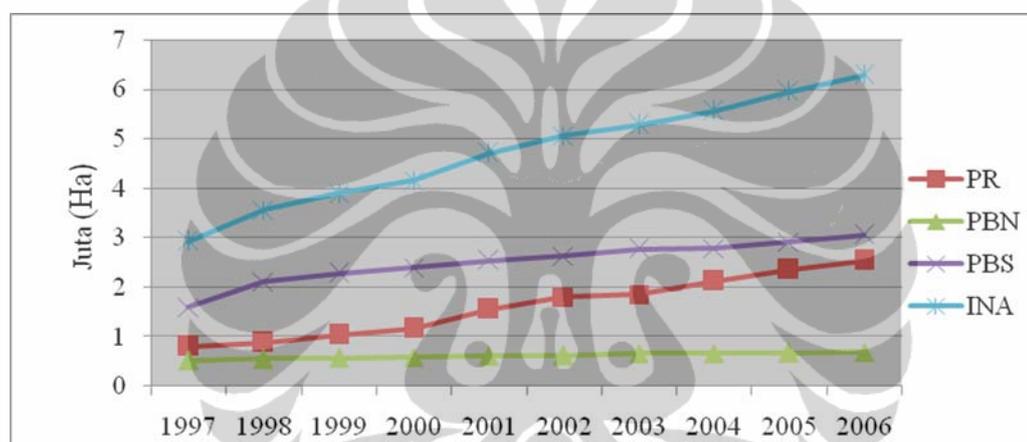
Sejak dikembangkan pada dekade 1960-an, perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu jika pada tahun 1967 Indonesia hanya memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 105.808 Ha maka setelah tiga puluh tahun kemudian yakni pada tahun 1997 sudah berkembang hingga 2,9 juta Ha. Pertumbuhan yang pesat terjadi pada kurun waktu 1990-1997, dimana terjadi penambahan luas areal tanam rata-rata 200.000 hektar setiap tahunnya, yang sebagian besar terjadi pada perkebunan swasta. Demikian pula periode 1999-2003 pertumbuhan mencapai hampir 1 juta Ha dan pertumbuhan yang paling fantastis adalah periode 4 tahun berikutnya sehingga pada tahun 2006 luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 6,6 juta Ha. Tren pertumbuhan perkebunan kelapa sawit 10 tahun terakhir sebesar 9.67%/tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi adalah perkebunan besar swasta sebesar 13.15 %/tahun (Dirjenbun, 2007 hal 4).



Gambar : 3.1
Luas Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Kepemilikan Tahun 2006

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan RI, 2007 hal 1.

Pertengahan 1990 an berlanjut hingga tahun 2006 pertumbuhan perkebunan rakyat (PR) maupun perkebunan besar swasta (PBS) mengalami perkembangan yang pesat sementara perkebunan milik negara atau perkebunan besar negara (PMN/PBN) cenderung melambat. Komposisi kepemilikan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006 terdiri dari PR seluas 2,6 juta Ha, PBS yang dimiliki oleh perusahaan swasta nasional dan penanaman modal asing yaitu 3,4 juta Ha dan PMN yang dikelola oleh PT. Perkebunan Negara (PT. PN) seluas 687 ribu Ha (Gambar 3.1). Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia periode 1997 – 2006 dapat dilihat pada Grafik 3.1.



Grafik : 3.2
Pertumbuhan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
1997-2006

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan RI. 2007

Areal perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar pada 22 propinsi dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Sumatera seluas 4,8 juta Ha (73 %) dan selanjutnya di Pulau Kalimantan dengan luas 1,6 juta Ha (23 %) dan sebagian di Pulau Sulawesi serta Jawa Barat, Banten dan Papua. Perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera terbentang dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Propinsi Lampung dengan hamparan terluas di Propinsi Riau seluas 1,6 juta Ha dan Propinsi Sumatera Utara seluas 980 ribu Ha.

Tahun 2006, menunjukkan bahwa dari luas perkebunan kelapa sawit 6,6 juta Ha, tanaman yang produktif menghasilkan kelapa sawit mencapai hampir 5 juta Ha atau sekitar 74,33 % (Dirjenbun, 2007).

3.2 Pabrik Kelapa Sawit

Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan unit pengolahan paling hulu dalam industri pengolahan kelapa sawit. Unit pengolahan tersebut adalah terdiri dari konfigurasi unit-unit proses yang memanfaatkan kombinasi perlakuan mekanis yang mengekstraksi CPO dan inti sawit dari tandan buah segar (TBS). Dengan demikian maka PKS merupakan salah satu faktor kunci sukses industri perkebunan kelapa sawit, karena menjadi titik kritis dalam alur hidup ekonomi buah kelapa sawit, yang mempunyai sifat cepat mengalami penurunan kualitas dan rendemen jika buah kelapa sawit tersebut tidak segera diolah. Di sisi lain, CPO dan inti sawit merupakan bahan antara industri olahan kelapa sawit dimana kualitasnya sangat menentukan daya gunanya untuk diolah menjadi produk akhir industri dan konsumen (Naibaho P.M, 2003)

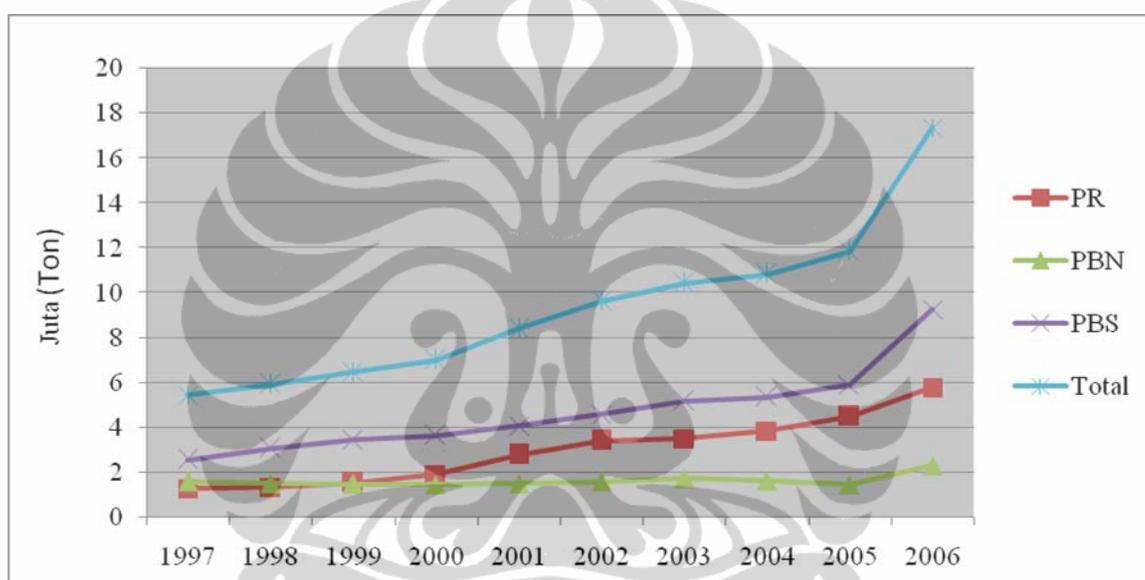
Sampai tahun 2006, jumlah PKS di Indonesia adalah 421 unit dengan kapasitas terpasang 18.343 ton TBS/jam. Kapasitas olah setiap unit PKS berkisar antara 15-60 ton TBS/jam, sebagian besar pabrik memiliki kapasitas 30-60 ton/jam. Sesuai dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit maka sebaran PKS terbanyak berlokasi di Propinsi Riau (128 unit), diikuti oleh Sumatera Utara (87 unit), Sumatera Selatan & Bangka Belitung (53 unit) serta Jambi (31 unit). Penyebaran lokasi PKS dan kapasitas olah pada beberapa Propinsi dapat dilihat pada lampiran. Kepemilikan PKS tersebut sebagian besar adalah pemilik PBS dan PBN yang dikelola PTPN, sedangkan hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari perkebunan rakyat lebih banyak diolah di PKS milik PBS (Ditjenbun, 2008).

3.3 Produksi CPO

Sejalan dengan peningkatan luas areal, dan didukung dengan ketersediaan PKS maka produksi CPO Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1997 produksi CPO Indonesia baru mencapai 5,5 juta ton, maka dalam tempo 10 tahun yaitu pada tahun 2006 sudah mencapai 16,6 juta ton sehingga melampaui jumlah produksi Malaysia sekitar 15,8 juta ton .

Lonjakan produksi yang cukup tajam terjadi pada kurun waktu 1999-2002 yang meningkat dari 6 juta ton menjadi 9 juta ton (*Palm Oil Statistics*. 2007).

Pertumbuhan produksi CPO Indonesia periode 1997-2006, menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun relatif lebih tinggi yakni 13,6 % sedangkan Malaysia pada periode yang sama hanya mencapai 6,9 %/ tahun. Kontribusi pertumbuhan produksi terbesar diberikan oleh PBS yang mencapai 53.34 % dari total produksi nasional, sedangkan PBN hanya menyumbangkan pertumbuhan sekitar 13.33 %.



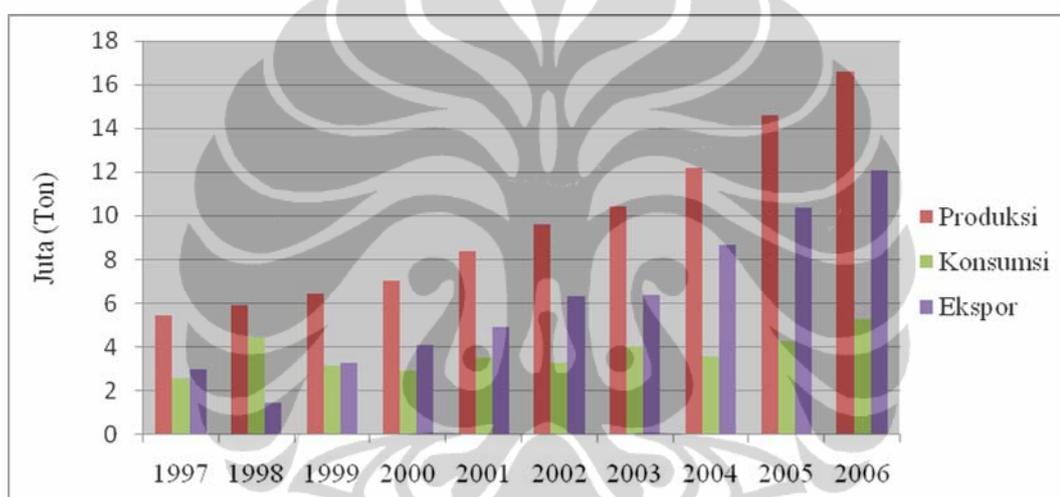
Grafik: 3.3
Pertumbuhan Produksi CPO Indonesia Menurut Pengusahaan,
1997 – 2006

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan (2007, diolah)

Peningkatan pertumbuhan produksi CPO Indonesia disebabkan karena relatif semakin meningkatnya prosentase luas tanaman yang menghasilkan, yakni seluas 5 juta Ha (74.33 %) dari total luas perkebunan 6.6 juta Ha, dengan demikian produktifitas dari kebun kelapa sawit sudah mencapai rata-rata 3,5 ton CPO/Ha atau 14,5-17,5 ton TBS/Ha (Ditjenbun, 2008). Jika dibandingkan dengan Malaysia perkebunan kelapa sawit rata-rata mempunyai produktifitas mencapai 24 ton TBS/Ha/tahun atau di atas 4,1 ton CPO/Ha/tahun (Darmawati 2004).

3.4 Konsumsi CPO Dalam Negeri

Pada mulanya konsumsi minyak sawit dalam negeri adalah untuk mengisi bahan baku minyak goreng yang tidak bisa dipenuhi dari minyak kelapa. Dengan pesatnya pertumbuhan produksi minyak sawit nasional maka terjadi pergeseran dimana minyak sawit menjadi sumber utama untuk mensuplai kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Diperkirakan sekitar 30-40 % produksi CPO dipakai untuk kepentingan domestik dan pabrik minyak goreng sebagai penyerap CPO yang paling dominan yakni 30 %, sedangkan sisanya dipakai oleh industri oleokimia, sabun dan margarine atau shortening.



Grafik : 3.4
Pertumbuhan Produksi, Konsumsi dan Ekspor CPO, 1997-2006

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan (2007, diolah)

Pada tahun 2005 konsumsi CPO di dalam negeri mencapai 3,6 juta ton dan pada tahun 2006 penggunaan CPO untuk memenuhi bahan baku minyak goreng sebesar 3.3 juta ton dan produk turunan lainnya sebesar 0,5 juta ton. Kebutuhan CPO dalam negeri selain dipasok dari produksi domestik juga sebagian kecil dipenuhi dari impor. Pada tahun 1997, Indonesia masih mengimpor CPO sebanyak 91,680 ton atau senilai US \$ 55,456 maka pada tahun 2006, Indonesia memenuhi kebutuhan domestik dari impor hanya 1,645 ton atau senilai US \$ 1,287 (BPS, 2007).

1.5 Ekspor CPO Indonesia

Indonesia bersama Malaysia menjadi pemasok utama kebutuhan CPO dunia dengan pangsa pasar masing-masing 43,3 % dan 43,2 % (*Palm Oil Statistics*, 2007). Ekspor CPO Indonesia pada tahun 1997 baru mencapai 2,97 juta ton dengan Nilai US \$ 1,45 milyar, dan sepuluh tahun kemudian yakni tahun 2006 meningkat menjadi 12,1 juta ton dengan perolehan devisa sekitar US \$ 4.82 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2005, jumlah ekspor mengalami lonjakan hingga 17 % dan penambahan devisa lebih dari US \$ 1 Milyar sementara pertumbuhan produksinya mencapai 13 %.

Tabel : 3.1
Produksi, Konsumsi , Volume dan Nilai Ekspor CPO Indonesia,1997 - 2006

Tahun	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Ekspor (Ton)	Nilai (ribu US \$)
1997	5.448.508	2.572.599	2.967.589	1.446.100
1998	5.930.415	4.458.775	1.479.278	745.277
1999	6.455.590	3.158.251	3.298.987	1.114.242
2000	7.000.508	2.894.831	4.110.027	1.087.278
2001	8.396.472	3.493.395	4.903.218	1.080.906
2002	9.622.344	3.298.136	6.333.708	2.092.404
2003	10.440.834	4.058.439	6.386.409	2.454.626
2004	12.194.492	3.537.165	8.661.647	3.441.776
2005	14.620.830	4.255.848	10.375.792	3.756.283
2006	16.569.927	5.250.572	12.100.921	4.817.642

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan RI (2007 hal 6-8).

Negara tujuan utama ekspor Indonesia pada tahun 2006 adalah, India, China, Singapura, Belanda dan beberapa Negara Uni Eropa lainnya termasuk Malaysia. India merupakan importir CPO terbesar Indonesia dengan nilai mencapai US \$ 738.263.037 atau sebesar 52,5 % dari total ekspor pada tahun 2006. Sedangkan pertumbuhan terbesar pada impor CPO dari Indonesia adalah Cina, di mana pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 516,86 % dari

tahun sebelumnya (*Palm Oil Statistics*, 2007). Di lain pihak, meskipun merupakan produsen CPO, Malaysia tetap mengimpor CPO dari Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan industri hilirnya. Selain Belanda, beberapa Negara Uni Eropa lainnya seperti Jerman, juga melakukan impor CPO dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel.

Dibandingkan dengan Malaysia, Cina merupakan negara importir CPO utama dari Malaysia, yang pada tahun 2006 mencapai 3,62 juta ton, Uni Eropa 2,6 juta ton dan Pakistan hampir mencapai 1 juta ton.

Tabel :3.2
Empat Besar Negara Tujuan Ekspor CPO Indonesia, 2002- 2006

Ton

Negara	2002	2003	2004	2005	2006
India	1.766.630	2.274.281	2.761.568	2.558.329	2.482.002
Uni Eropa	1.604.364	1.111.095	1.545.105	2.202.551	2.415.993
Malaysia	404.969	367.725	572.765	621.448	660.479
Singapura	350.057	383.577	416.017	467.055	631.603
Lainnya	2.207.688	2.249.731	3.366.192	4.526.409	5.910.844
Total	6.333.708	6.386.409	8.661.647	10.375.792	12.100.921

Sumber : *Palm Oil Statistics*, 2007 (diolah)

Perkembangan ekspor CPO Indonesia sangat fluktuatif, namun tetap menunjukkan tren peningkatan. Permintaan CPO di pasar internasional yang sering berubah-ubah ini disebabkan oleh permintaan pada beberapa minyak nabati lain yang menjadi substitusi utama CPO juga mengalami perubahan permintaan, seperti minyak kedelai, minyak kanola dan minyak biji bunga matahari. Di samping itu, perubahan harga pada minyak bumi pun turut berpengaruh, sebab beberapa negara importir CPO terbesar menggunakan CPO sebagai bahan baku bagi bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006), pertumbuhan produksi CPO di dunia adalah rata-rata 9,26 % pertahun, dibanding dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai hanya tumbuh 3,63 % dan pertumbuhan pangsa

terbesar yaitu 2,84 % pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhnya produksi ini akibat dari permintaan terhadap CPO relatif meningkat dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sementara disisi lain permintaan terhadap barang substitusi CPO mengalami penurunan terlihat dari pertumbuhan yang lebih lambat dan terjadinya penurunan pangsa pada beberapa minyak nabati lainnya (*Palm Oil Statistics*, 2007).

Tabel : 3.3
Produksi & Pangsa Minyak Nabati Dunia, 2001-2006
(ribu ton)

Jenis Minyak	Produksi		Growth (% pa)	Pangsa		Growth (% pa)
	2002	2006		2002	2006	
Minyak Kedelei	29.861	35.278	3,63	30,36	28,00	-1,56
CPO	25.392	37.142	9,26	25,81	29,48	2,84
Rapeseed	13.307	18.510	7,82	13,53	14,69	1,72
Sunflower	7.624	11.191	9,36	7,75	8,88	2,92
Lainnya	22.181	23.863	1,52	22,55	18,95	-3,19
Total	98.365	125.984	5,62	100	100	

Sumber : *Palm Oil Statistics*, 2007

1.6 Pangsa Pasar CPO Indonesia dan Malaysia

Pada tahun 2006 total produksi CPO dunia mencapai 37 juta ton dan 29 juta ton diperdagangkan di pasar internasional atau diekspor oleh negara produsen dimana Indonesia bersama Malaysia memasok 26,5 juta ton (91 %). Ekspor CPO Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya atau ratio antara jumlah produksi dengan total ekspor terus meningkat. Dibandingkan dengan Malaysia ratio angka ekspor terhadap total produksi relatif lebih besar. Pangsa pasar ekspor antara Indonesia dan Malaysia pada pertengahan tahun 1980 an, Malaysia masih jauh memimpin sekitar 70 % sementara Indonesia hanya mendekati 10 %. Namun demikian perbedaan pangsa pasar ini mulai semakin menipis pada tahun 2003 hingga tahun 2006.

Sampai tahun 2005, Malaysia selalu lebih unggul baik dalam jumlah produksi CPO maupun dalam kegiatan ekspor. Namun demikian Malaysia sebagai produsen CPO terbesar di dunia posisinya mulai bergeser pada tahun

2006, dengan jumlah produksi hanya mencapai 15.8 juta ton sementara pada periode yang sama produksi CPO Indonesia sudah melampaui 16.6 juta ton tetapi dalam jumlah ekspor Malaysia masih lebih besar dari pada total ekspor Indonesia (Ditjenbun, 2007).

Tabel : 3.4
Perbandingan Produksi dan Volume Ekspor CPO
Indonesia dengan Malaysia, 2001-2006

Keterangan		2001	2002	2003	2004	2005	2006
Malaysia	Prod (Jt ton)	11.80	11.90	13.35	13.98	14.96	16.05
	Persen(%)	48.54	46.41	47.56	45.60	44.76	43.49
	Ekspor (ton)	10.90	11.20	12.25	12.58	13.44	15.54
	Pertumb (%)	8.86	0.93	12.09	4.72	7.01	7.29
Indonesia	Prod (Jt ton)	8.40	9.62	10.44	12.23	13.10	15.90
	Ekspor (ton)	4.90	6.33	6.39	8.66	10.38	12.10
	Persen (%)	34.55	37.49	37.19	39.89	39.23	43.09
	Pertumb (%)	20.00	14.52	8.52	17.15	7.20	21.37
Lainnya	Prod (Jt ton)	4.11	4.13	4.28	4.45	5.35	4.95
	Persen (%)	16.91	16.10	15.25	14.51	16.01	13.4
	Pertumb (%)	3.01	0.49	3.63	3.97	20.22	-7.42
Dunia	Prod (Jt ton)	24.31	25.66	28.07	30.66	33.42	36.90
	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
	Pertumb (%)	11.36	25.66	28.07	30.66	33.42	10.42

Sumber : *Palm Oil Statistics*, 2007 (diolah)

Pangsa pasar ekspor CPO Indonesia dan Malaysia Tahun 2006, mencapai 91 %. Struktur industri produk CPO di Indonesia sangatlah timpang dibandingkan dengan kondisi di Malaysia. Studi yang dilakukan oleh INDEF memperlihatkan bahwa di tahun 2006, Indonesia mengekspor 40% CPO dan 60% produk derivatif CPO, sebaliknya Malaysia mampu mengekspor sekitar 16% CPO dan 84% produk derivatifnya (Sugema *et al*, 2007).

Negara-negara yang banyak mengimpor CPO dari Malaysia adalah China & Hongkong (3,64 juta ton), Uni Eropa (2,6 juta ton) dan Pakistan (0.97 juta ton). Sementara Indonesia pada tahun 2006, melakukan ekspor CPO ke

negara India (2,5 juta ton) dan Negara-Negara Uni Eropa (2,4 juta ton). Pertumbuhan impor CPO oleh Cina dari Indonesia juga menunjukkan tren meningkat, tahun 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 atau mencapai 1,7 juta ton.

Di sisi lain, Malaysia dan Singapura juga tercatat sebagai negara importir utama CPO dari Indonesia, Singapura sebagai negara jasa sangat terkait dengan kepentingan untuk perdagangan lanjutan ke negara tujuan akhir pembeli CPO. Sedangkan Malaysia diduga kuat dalam rangka memenuhi kebutuhan industri pengolahannya khususnya industri oleochemical.

Tabel : 3.5
Pangsa Pasar CPO Dunia Tahun 2006

Negara	2006 (Ton)	Pangsa (%)
Malaysia	14.300	48.76%
Indonesia	12.140	41.40%
Papua Nugini	313	1.07%
Kolombia	265	0.90%
Lain-Lain	2.308	7.87%
Total	29.326	100.00%

Sumber : *Palm Oil Statistics*, 2007 (diolah).

1.7 Pengembangan Industri Hilir

Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) menghasilkan CPO dan inti sawit (*palm kernel*) atau biji sawit. Pada akhir tahun 1970-an, mulai dikenal teknologi yang mengolah CPO menjadi minyak goreng melalui proses pemurnian (*refining and deodorization*) dan pemisahan (*fractionation*). Melalui proses ini maka diperoleh fraksi cair yang sering disebut RBD Palm Olein (*Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*), dan RBD Palm Stearin (fraksi padat) serta PFAD (*Palm Fatty Acid Distillate*). RBD Palm Olein inilah yang selanjutnya dipakai sebagai minyak goreng (Bangun, D. 2005).

Dengan semakin meningkatnya harga kopra di pasar internasional pada awal tahun 1980-an mendorong peningkatan ekspor minyak kelapa, sehingga minyak goreng asal kelapa sawit (RBD Palm Olein) menjadi substitusi dari minyak goreng asal kopra. Sejak itu, pendirian pabrik pengolahan minyak goreng berlangsung pesat, terlebih setelah tata niaga CPO diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian. Tata niaga tersebut memberikan margin keuntungan yang sangat besar bagi pabrik pengolahan, karena setiap pabrik pengolahan memperoleh alokasi CPO sesuai dengan kapasitas pengolahannya dan dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga di pasar internasional (Bangun, D., 2005).

Perkembangan industri hilir ini sangat tergantung dari kebijakan dan intervensi pemerintah, hal ini terbukti setelah SKB 3 menteri mengalami modifikasi maka pabrik pengolahan yang semula kapasitasnya sudah mencapai 10 juta ton/tahun atau melebihi jumlah produksi CPO pertumbuhannya sudah mulai melambat. Industri hilir di luar industri makanan hasil utamanya adalah *fatty acid* atau asam lemak dan *glycerine*.

Perubahan pola konsumsi masyarakat dari minyak goreng kelapa kepada minyak goreng kelapa sawit membawa konsekuensi terjadinya pergeseran permintaan terhadap kebutuhan konsumsi CPO dalam negeri. Pada tahun 2006, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng adalah 16,5 kg/kapita/tahun dan sebagian besarnya atau 12,7 kg diantaranya berasal dari minyak goreng sawit. Pada tahun 1999, kebutuhan minyak goreng dalam negeri (konsumsi rumah tangga ataupun untuk industri) mencapai 3,2 juta ton, maka pada tahun 2005 sudah meningkat dua kali lipat hingga di atas 6 juta ton dan 5 juta ton diantaranya dipenuhi dari minyak goreng kelapa sawit (Tabel : 3.5). Preferensi konsumen terhadap minyak goreng sawit turut menentukan jumlah konsumsinya karena alasan kesehatan yakni minyak goreng sawit mengandung *trans fatty acid* yang relatif rendah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Masalah trans fat ini telah berkembang di Amerika Serikat, pihak Food and Drugs Administration (FDA), telah menetapkan peraturan bahwa kandungan *trans fat* harus dicantumkan pada label makanan jadi sejak tanggal 1 Januari

2006. Oleh karena itu banyak perusahaan besar pada industri bahan makanan mengubah komposisi bahan bakunya yang kandungan trans fatnya lebih rendah. Maka sejak itu produsen makanan jadi banyak yang beralih sumber bahan bakunya dari sebelumnya yakni minyak kedelai, minyak kanola dan minyak bunga matahari ke bahan baku CPO.

Konsumsi minyak goreng sawit yang terus meningkat mendorong pertumbuhan pabrik pengolahan minyak goreng baik yang berskala besar maupun dalam bentuk usaha rumah tangga. Jika tahun 2005 jumlah pabrik pengolahan minyak goreng baru sekitar 80 maka pada tahun 2006 meningkat menjadi 118 unit dengan total produksi hingga 6,4 juta ton. Pabrik pengolahan minyak goreng sawit yang berskala besar kepemilikannya terintegrasi dengan pemilik dari perkebunan besar swasta dan dimiliki oleh kelompok usaha besar swasta yang mengendalikan produksi dan harga (*price leader*) minyak goreng sawit.

Tabel : 3.6
Pertumbuhan Konsumsi Minyak Goreng, 1999-2006

0,000

Tahun	MGS (ton)	Tbh (%)	Pangsa (%)	MGK (ton)	Tbh (%)	Pangsa (%)	Total (ton)	Tbh (%)
1999	2.494.1	4.4	77.5	725.8	75	22.5	3.219.9	5.1
2000	2.806.1	12.5	78.5	769.5	6.0	21.5	3.575.6	11.0
2001	3.137.9	11.8	79.6	806.5	4.8	20.4	3.944.4	10.3
2002	3.508.1	11.8	80.6	846.9	5.0	19.4	4355.0	10.4
2003	3.964.9	13.0	81.8	879.8	3.9	18.2	4.844.7	11.2
2004	4.527.7	14.2	82.9	933.4	6.1	17.1	5461.1	12.7
2005	5.062.8	11.8	83.8	980.4	5.0	16.2	6.043.3	10.7

Keterangan : MGS = Minyak Goreng Sawit
MGK = Minyak Goreng Kelapa

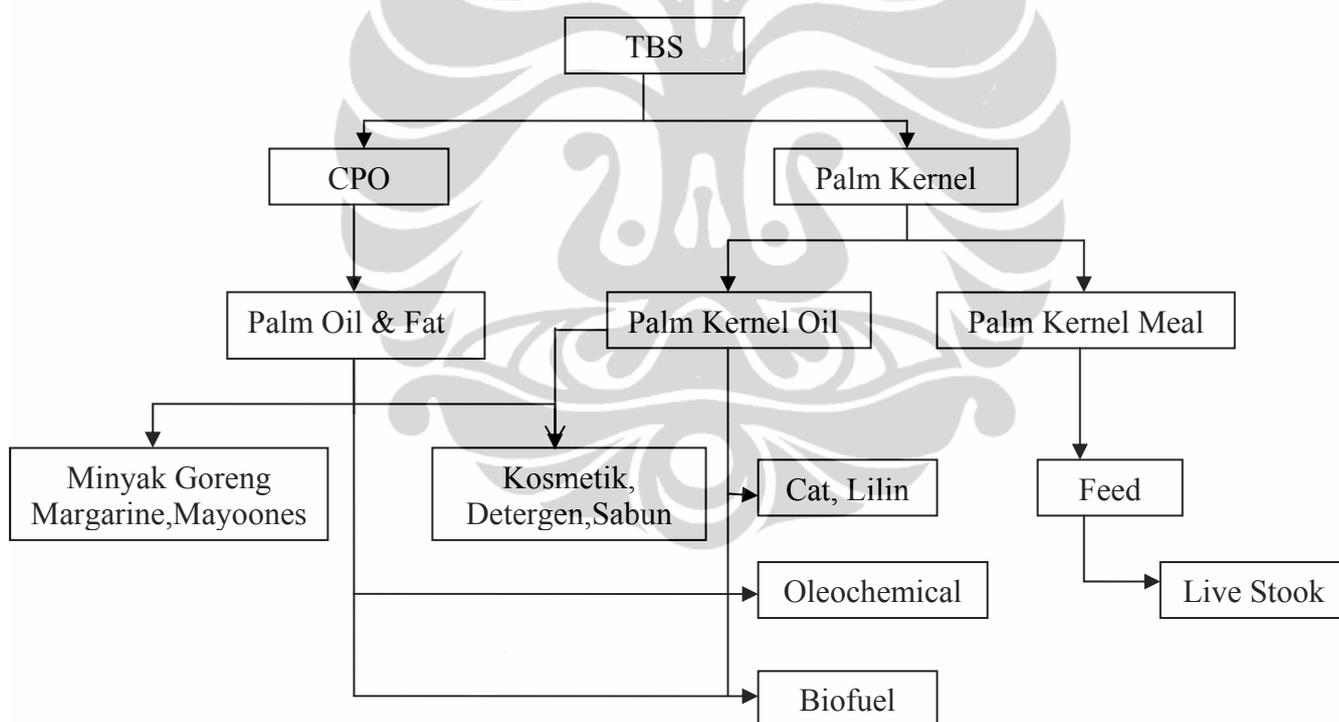
Sumber : Jakarta Futures Exchange (2007 hal 1)

Pemilik usaha pengolahan industri hilir ini, sangat independen dalam mengatur alokasi produksi dan kuota ekspor CPO. Manakala harga CPO di pasar internasional melonjak maka mereka melakukan ekspor sebanyak-

banyaknya sehingga kebutuhan bahan baku pabrik pengolahan minyak goreng sawit mereka pun tidak tercukupi.

Sedangkan untuk industri oleochemical membutuhkan bahan baku Palm Kernel Oil (PKO) dengan hasil utama berupa *fatty acid* dan *glycerine* dan dalam proses pengolahan kimiawi selanjutnya akan menghasilkan shampoo, deterjen serta kosmetik. Pada tahun 2004 pasar oleochemical dunia membutuhkan *fatty acid* sebanyak 6-7 juta ton dan fatty alkohol sekitar 2 juta ton. Industri Oleochemical Indonesia hanya mampu memproduksi 342 ribu ton.

Dan pada tahun 2006 pabrik pengolahan oleochemical sudah berdiri di tiga propinsi yaitu 3 unit di Sumatera Utara serta masing-masing 1 unit di Kepulauan Riau dan DKI Jakarta dengan kapasitas produksi 951.070 ton (*Palm Oil Statistics, 2007*).



Gambar : 3.5

Pohon Industri Agribisnis Kelapa Sawit

Sumber : Panduan Lengkap Kelapa Sawit (2006 hal. 18)

3.8 Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Minyak Goreng Sawit

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada periode 1997-1998, dampaknya menular ke sektor lainnya, termasuk industri minyak goreng dalam negeri. Pertengahan tahun 1997 hingga akhir 1998, terjadi kenaikan harga minyak goreng sawit dari Rp 1.250/kg – Rp 1.450/kg sebelum krisis, melonjak drastis menjadi hingga mencapai harga lebih dari Rp 6.000/kg. Kenaikan harga minyak goreng sawit pada saat itu dipicu oleh kurangnya pasokan CPO kepada pabrik pengolahan minyak goreng. Kekurangan pasokan CPO tersebut diduga disebabkan karena meningkatnya harga CPO di pasar internasional yang mendorong produsen CPO mengejar devisa melalui ekspor.

Tabel : 3.7
Harga Rata-Rata Minyak Goreng dan Harga CPO
1997-2006

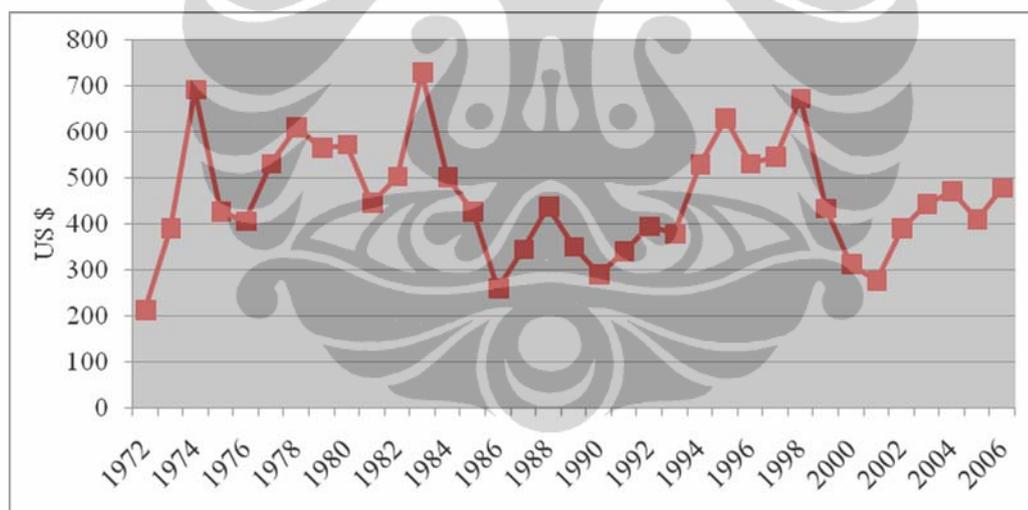
Tahun	Harga minyak goreng sawit (Rp/Kg)	Harga CPO Domestik (Rp/Kg)	Harga CPO Ekspor (US \$/MT)
1997	1.527	1.139	545
1998	5.449	2.408	672
1999	4.143	2.435	432
2000	3.418	2.205	311
2001	3.539	2.221	283
2002	4.400	3.109	390
2003	4.802	3.704	442
2004	5.177	4.097	470
2005	5.066	3.759	420
2006	5.315	4.138	477

Sumber : Kantor Pemasaran Bersama, Jakarta (2007, diolah)

Upaya yang ditempuh pemerintah pada saat itu untuk menstabilkan harga minyak goreng sawit cukup beragam dan dinamis, dan diberlakukan sesuai dengan perkembangan masalah yang terjadi. Berdasarkan data pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam pengamanan harga dan persediaan minyak goreng dalam negeri yang diambil pada periode tersebut, kebijakan pemerintah selalu

terkait dengan penetapan alokasi CPO bagi kebutuhan dalam negeri; penetapan harga CPO untuk penjualan dalam negeri; penetapan pajak ekspor CPO; dan tindakan operasi pasar minyak goreng.

Berbagai referensi menyatakan bahwa beberapa kebijakan perdagangan yang telah ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan CPO dalam negeri dalam beberapa hal dianggap cukup mengenai sasaran, namun demikian dalam penataan kelembagaan distribusi, khususnya dalam penanganan operasi pasar yang diterapkan pada kurun waktu 1997-1998 banyak yang tidak efektif. Sebagai contoh, kebijakan penunjukan koperasi pasar dan salah satu BUMN Perdagangan untuk menggantikan BULOG dalam menangani distribusi minyak goreng sampai ke tingkat konsumen banyak mengalami kendala. Ketidaksiapan kedua lembaga pengganti peran BULOG tersebut menyebabkan jalur distribusi pemasaran menjadi tidak efisien (Lingga, 1998. hal 57).



Grafik : 3.6
Perkembangan Harga CPO Dunia (Harga FOB US \$/MT),
1972-2006

Sumber : Kantor Pemasaran Bersama, Jakarta (2007, diolah)

Sepuluh tahun kemudian, yakni semester dua tahun 2006, krisis harga minyak goreng sawit dalam negeri kembali melanda Indonesia, penyebabnya hampir sama dengan sebelumnya yaitu kenaikan harga CPO di pasar internasional sampai mencapai angka tertinggi US\$ 1200 per ton, sehingga mendorong produsen CPO dalam negeri mengejar ekspor.

Kenaikan harga CPO di pasar global lebih banyak dipicu dari kenaikan harga minyak mentah (*crude oil*) sehingga di beberapa negara penggunaan bahan bakarnya beralih ke bahan bakar biodiesel yang berbahan baku CPO. Sebelumnya di Eropa industri biodiesel menggunakan bahan minyak kanola, berhubung cuaca yang dingin mengharuskan mereka mencari bahan baku alternatif yang mempunyai titik cair yang rendah (*melting point*), dan CPO mempunyai titik cair yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang pada umumnya dalam fraksi cair (Bangun D., 2005, hal 46).

Gejolak permintaan di berbagai negara dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi maupun sebagai sumber bahan bakar alternatif menimbulkan peningkatan jumlah ekspor CPO dari Indonesia, yang pada akhirnya mengurangi jumlah kebutuhan dalam negeri sehingga industri pengolahan minyak goreng mengalami kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku ini menyebabkan industri pengolahan minyak goreng sawit tidak mampu mencukupi kebutuhan permintaan pasar domestik dan pada akhirnya menyebabkan harga minyak goreng sawit pun naik.

Jika ditelaah, maka respon pemerintah menghadapi gejolak kenaikan harga saat ini hampir sama dengan kebijakan yang diterapkan sepuluh tahun lalu. Kebijakan tersebut meliputi pengalokasian produksi CPO untuk kebutuhan domestik, pengendalian ekspor melalui penetapan pajak ekspor progresif dan operasi pasar domestik.

Efektifitas dari kebijakan pemerintah terhadap penurunan harga minyak goreng tidak terlepas dari struktur pasar yang terjadi didalam pasar minyak goreng. Sebab pada umumnya transaksi CPO terjadi di pasar berjangka (*future market*), dimana harga yang terbentuk adalah harga untuk penyerahan kemudian. Kebijakan pemerintah yang sifatnya mendadak sudah pasti akan mengganggu mekanisme ini, bagi Indonesia yang menjual sebagian besar CPO ke pasar internasional, tentu saja perubahan mendadak akan lebih berdampak negatif ketimbang bagi Malaysia yang mengelola sebagian besar CPO mereka di dalam negeri (Basri, F. 2006).

Beberapa kebijakan pemerintah tersebut dalam pengendalian harga minyak goreng maupun harga CPO selama kurun waktu 1997-2006 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 3.8
Kebijakan Pemerintah untuk Stabilisasi
Harga CPO dan Minyak Goreng

Periode		Kebijakan Pemerintah
Juli 1997 - Mei 1998	1.	Penetapan larangan ekspor CPO hasil produksi Perkebunan Negara (PT. PN) dan mewajibkan mensuplai CPO untuk industri pengolahan minyak goreng dalam negeri.
	2.	Penerapan pajak ekspor CPO dan pruduk turunannya hingga mencapai 60 %.
	3.	Penataan jalur distribusi minyak goreng dengan melibatkan koperasi sebagai penyalur, bekerjasama dengan BULOG
Juli 1998 - 2001	1.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.017/1998, tanggal 17 Juli 1998 tentang penetapan Pajak Ekspor CPO dan turunannya, khusus CPO ditetapkan pajak Ekspor sebesar 60 %.
	2.	Penurunan pajak ekspor CPO secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan dan keseimbangan antara permintaan ekspor dan pasokan untuk dalam negeri
	3.	Penataan jalur distribusi dengan menunjuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) untuk memasarkan minyak goreng langsung kepada koperasi pasar tanpa melalui BULOG.
2001 - 2005	1.	Penetapan pajak ekspor melalui peraturan pemerintah (PP) yang diikuti dengan penetapan harga patokan ekspor. Kebijakan PP No. 35/2005, yang menetapkan pungutan ekspor CPO besarnya 3 % dari harga

		patokan ekspor CPO.
	2.	Fasilitas pendirian perkebunan kelapa sawit terpadu dengan refinery skala 5-10 ton TBS/jam dan pendirian pabrik minyak goreng sawit skala kecil di lokasi pengasil CPO.
2006 - sekarang	1.	Pemerintah melakukan stabilisasi harga dengan operasi pasar, subsidi langsung (konsumen) dan alokasi bahan baku CPO kepada prosessor minyak goreng dalam negeri.
	2.	Pemberlakuan pajak ekspor yang progressif dari 1,5 % menjadi 5%, 6,5 %, 10 % dan 12,5 %
	3.	Pedoman ijin usaha perkebunan, PKS minimal kapasitas 5 ton/jam, satu ijin usaha maksimum luas kebun 100 ribu Ha.

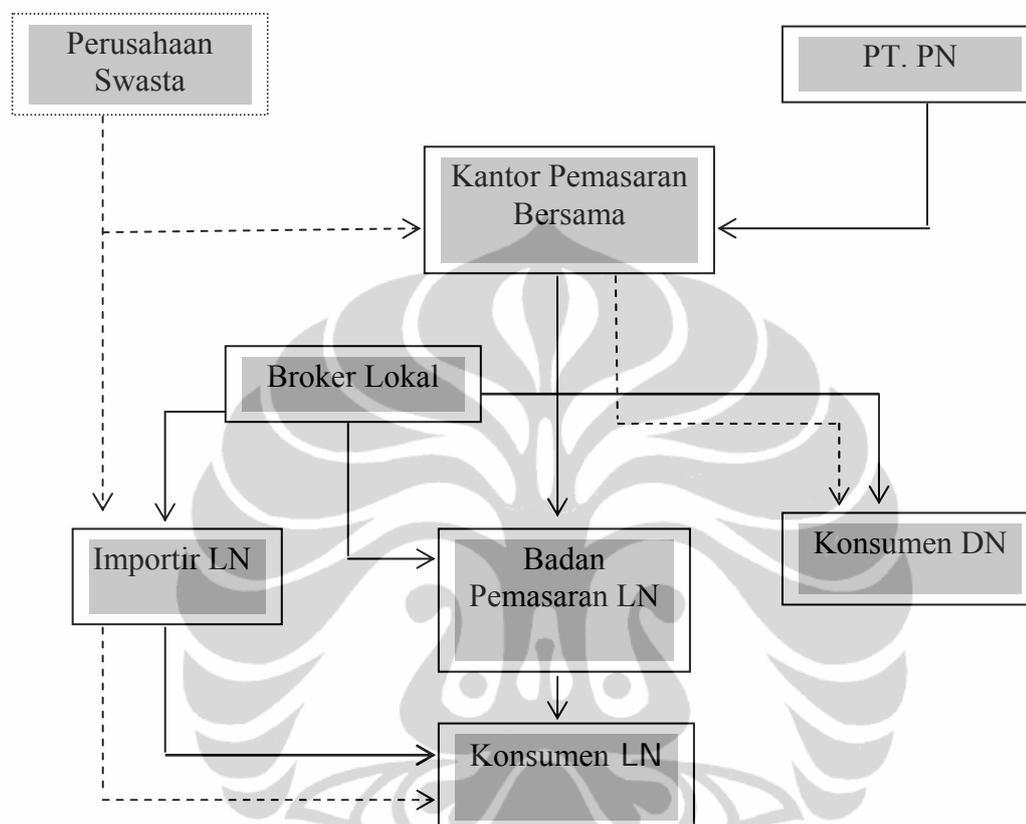
Sumber : Salya D.H., 2006

3.9. Permasalahan

Tataniaga CPO dan produk turunannya sudah berkembang menjadi sektor unggulan dari perkebunan karena besarnya kontribusi yang diberikan kepada pendapatan kotor nasional (*Gross Domestic Bruto*), dan dari sisi lain mempunyai efek tular (*multiplier effect*) yang dapat mendorong sektor-sektor lainnya berkembang.

Jumlah produksi yang terus bertambah setiap tahun dan semakin meningkatnya jumlah permintaan konsumsi baik di dalam negeri maupun di pasar internasional sering menimbulkan masalah bagi pemenuhan terhadap permintaan tersebut. Penyebabnya adalah ketersediaan CPO untuk industri pengolahan di dalam negeri selalu menjadi prioritas nomor dua setelah pemenuhan kebutuhan untuk permintaan pasar ekspor. Kondisi tersebut terjadi apabila harga ekspor CPO jauh lebih tinggi dibanding dengan harga CPO di dalam negeri. Tetapi sebaliknya jika harga CPO di pasar luar negeri cenderung menurun maka permintaan pun berkurang, suplai di dalam negeri berlebih maka

harga jualnya juga menjadi menurun. Saluran pemasaran CPO ke konsumen domestik dan internasional dapat dilihat pada gambar 3.7



Gambar : 3.7
Saluran Pemasaran CPO di Dalam Negeri & di Luar Negeri

Sumber : Panduan Lengkap Kelapa Sawit (2007, hal 39)

Produsen CPO khususnya perusahaan swasta menjual CPO ke luar negeri langsung kepada konsumen di pasar internasional melalui importir, hanya sewaktu-waktu melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) jika akan dipasarkan kepada konsumen di dalam negeri. Sedangkan CPO produksi dari PT PN seluruhnya melalui jalur pemasaran KPB baik untuk pemasaran ke pasar luar negeri maupun untuk kepentingan pasar domestik. Importir LN membeli CPO dari jalur langsung ke perusahaan swasta dan juga melalui jasa broker. Broker memperoleh CPO dari produksi PT PN dan Perusahaan swasta atau perusahaan milik pribadi. Mekanisme pemasaran bisa tidak berjalan sempurna bila ada

kondisi ekstrim yang mencakup perubahan harga secara drastis yaitu harga melonjak dan atau turun tajam.

Ketersediaan industri hilir Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia sangat tertinggal dalam industri pengolahan CPO. Pada tahun 2006 Indonesia hanya mempunyai industri oleochemical sebanyak 5 unit dengan kapasitas olah kurang dari 1 juta ton. Ekspor CPO pada waktu yang sama sudah mencapai 12 juta ton. Malaysia sebaliknya melarang ekspor CPO sebelum dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Kekurangan suplai CPO untuk kebutuhan pemenuhan minyak goreng sawit di dalam negeri karena peningkatan jumlah ekspor selalu dilakukan dengan tindakan penetapan pajak ekspor CPO, sementara tindakan ini sering menimbulkan distorsi baik pada sisi produksi maupun sisi konsumsi. Efektifitas dari kebijakan fiskal pemerintah tersebut kadang-kadang tidak mampu menanggulangi kepentingan jangka pendek yaitu menstabilkan harga minyak goreng sawit.

Pabrik pengolahan minyak goreng yang berskala besar juga mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang relatif luas, sehingga mereka mampu mengatur antara ketersediaan bahan baku bagi industrinya dan mengisi pasar ekspor. Jika harga CPO di luar negeri melonjak maka produsen tersebut cenderung menjual sebanyak-banyaknya CPO termasuk untuk kebutuhan industrinya ke luar negeri, sehingga ketersediaan bahan baku untuk pabrik pengolahan minyak goreng milik mereka berkurang.

Penerapan kebijakan fiskal melalui pajak ekspor CPO terkadang menjadi distortif karena struktur pasar industri ini terindikasi kartel dengan pasar yang sangat monopolistik dan oligopolistik. Penerapan kebijakan yang bersifat populistik seperti operasi pasar terbuka, subsidi langsung memang efektif meredam kenaikan harga minyak goreng sawit tetapi hanya dalam jangka pendek, implementasinya rumit dan memerlukan alokasi sumber daya yang relatif besar.

Tabel : 3.9
Keputusan Pemerintah Terhadap Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor (PE)
CPO Tahun 1997-2006

No	Keputusan Menteri Keuangan RI	PE (%)	Masa Berlaku
1.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 300/KMK.01/1997 Tentang Perubahan Tarif Pajak Ekspor atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein & Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein).	5	4 -7-1997
2.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 334/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Besarnya Tarif & Tatacara Penyetoran Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu	60	7-7-1998
3.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 30/KMK.01/1999 Tentang Penetapan Besarnya Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.	40	1-2-1999
4.	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 189/KMK 017/1999 tentang Penetapan Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, Minyak Kelapa & Produk Turunannya.	30	3-6-1999
5.	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 360/KMK 017/1999 Tentang Penetapan Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO & Produk Turunannya.	10	2-7-1999
6.	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 387/KMK 017/2000 Tentang Penetapan Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO & Produk Turunannya.	5	12-9-2000
7.	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 66/KMK 017/2001 Tentang Penetapan Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO & Produk Turunannya	3	1-3-2001
8.	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.	3	10-9-2005

Sumber : Direktorat Jenderal Bea & Cukai Depkeu, 2007

BAB 4

METODOLOGI DAN PEMBENTUKAN MODEL

Dalam penelitian ini digunakan data bulanan series panjang sejak Januari 1997 sampai dengan Desember 2006. Metodologi yang akan digunakan adalah persamaan simultan dan selanjutnya koefisien dari masing-masing variabel akan diestimasi dengan *Two Stage Least Squares (2 SLS)*, jika pada identifikasi model persamaan simultan tersebut memenuhi syarat, yaitu syarat perlu atau *order condition* dan syarat cukup atau *rank condition*.

4.1 Pengumpulan Data

Data kuantitatif yang dipakai dalam analisa tesis ini adalah seluruh variabelnya memakai data deret waktu (*time series*) bulanan yang diperoleh dari data sekunder. Khusus untuk variabel pajak ekspor (PE) dibuat dalam bentuk variabel dummy dimana jika $PE \geq 5\%$ diberi notasi 1 dan jika $PE < 5$ diberi notasi 0. Data bulanan diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dari seluruh variabel terhadap permasalahan yang akan dianalisis, sehingga keterkaitan pengaruh antar variabel dapat ditelusuri dengan pendekatan ekonometrika.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah dipublikasikan yaitu, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Perum BULOG, Kantor Pemasaran Bersama PT. Perkebunan Nusantara serta sumber lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Harga minyak goreng sawit (dalam Rp/kg), data diperoleh dari Divisi Harga Dasar Perum BULOG. Perkembangan harga minyak goreng sawit dimonitor setiap bulan pada beberapa kota pencatatan inflasi, mengingat minyak goreng sawit adalah salah satu komoditi deflator.
2. Produksi minyak goreng sawit (dalam Ton/bulan), diperoleh dari BPS dihitung dari total produksi minyak goreng yang diproses pada industri pengolahan minyak goreng sawit.
3. Konsumsi minyak goreng sawit (dalam ton/bulan) diperoleh dari BPS, dihitung total minyak goreng sawit yang langsung dikonsumsi oleh

penduduk termasuk pemakaian minyak goreng untuk kebutuhan industri makanan olahan.

4. Produk Domestic Bruto /PDB (dalam US \$ /tahun) diperoleh dari BI. Penghitungan PDB memakai harga konstan tahun 2000.
5. Ekspor CPO (dalam Ton/bulan), diperoleh dari Dirjen Perkebunan Deptan. Volume ekspor CPO mencakup total volume ekspor CPO mentah dan CPO hasil olah tetapi tidak termasuk Palm Kernel Oil (PKO).
6. Harga CPO di dalam negeri (dalam Rp/kg) diperoleh dari Kantor Pemasaran Bersama, dihitung dari harga transaksi rata-rata bulanan yang terjadi di KPB.
7. Nilai Kurs (dalam %/tahun), diambil dari publikasi BI sebagai acuan Bank dalam menyalurkan kredit komersial untuk investasi kepada calon kreditor.
8. Pajak Ekspor (dalam %), jarak waktu tidak menentu dan karena sifatnya kualitatif maka dalam analisis ini dibuat variabel dummy. Pajak Ekspor ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan dan sejak tahun 2005 ditetapkan melalui sebuah Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2005 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan sejak Tahun 1984 dan istilah pajak ekspor diubah menjadi pungutan ekspor.
9. Harga CPO di pasar internasional (US \$ /Metrik Ton), dikeluarkan oleh KPB yang dipantau dari rata-rata harga transaksi yang terjadi antara produsen di dalam negeri dengan pedagang atau konsumen di luar negeri. Harga jual biasanya ditetapkan pada kondisi CPO sampai ke lambung kapal pengangkut atau biasa di sebut *Freight on Board (FOB)*, sehingga biaya angkut tidak termasuk dalam komponen harga jual. Harga tersebut juga menjadi patokan dalam perhitungan pembayaran pajak atau pungutan ekspor. Namun dalam analisis ini harga CPO yang dipergunakan adalah harga patokan luar negeri (*Rotterdam Market Price*) dimana harga tersebut biasanya disebut *Cost In Freight (CIF)*, atau harga jual setelah barang sampai kepada pelabuhan bongkar dari pembeli.
10. Nilai tukar (Exchange Rate) dikeluarkan oleh BI sebagai acuan Bank dalam bertransaksi dengan nasabah. BI menetapkan nilai tukar mata uang

asing terhadap rupiah khususnya mata uang yang sering dipakai sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan di pasar internasional (biasanya dalam Rupiah/ 1 US \$). Kekuatan dan kelemahan nilai tukar mata uang sebagai pencerminan dari kekuatan struktur ekonomi makro.

11. Rentan waktu 1997-2006 dipilih karena pada periode ini harga minyak goreng sawit maupun harga CPO baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sangat fluktuatif. Demikian pula kebijakan pajak ekspor sangat variatif yakni antara 3-60 %. Kondisi makro ekonomi pun cukup beragam terlebih karena pada periode tersebut Indonesia baru saja lepas dari krisis ekonomi yang bermula dari krisis moneter, yang dalam penelitian ini memakai beberapa variabel yang erat kaitannya dengan kondisi makro ekonomi.

4.2 Metodologi dan Pembentukan Model

Berdasarkan latar belakang yang dibangun dalam alur mata rantai industri kelapa sawit dari hilir hingga hulu maka dapat diformulasikan beberapa persamaan ekonometrika yang disusun dari beberapa variabel. Sehingga persamaan yang tersusun menjadi persamaan simultan.

a. Pembentukan Harga Minyak Goreng Sawit.

Harga minyak goreng sawit terbentuk dari mekanisme pasar sebagai interaksi antara kekuatan suplai dengan permintaan atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh kemampuan daya beli. Oleh karena itu maka persamaan dibuat sebagai berikut :

$$H_{MG} = c_{10} + c_{11} P_{MG} + c_{12} C_{MG} + c_{13} PDB + u_1$$

dimana,

HMG = Harga minyak goreng sawit

PMG = Total produksi minyak goreng sawit

CMG = Total konsumsi minyak goreng sawit

PDB = Product Domestic Bruto

Rumusan persamaan di atas merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djaenuddin dan Gonarsyah (2002 hal 39), dimana harga minyak goreng sawit akan tergantung kepada ketersediaan minyak

goreng di pasar, dengan kata lain ketersediaan minyak goreng di pasar akan ditentukan oleh besarnya suplai dan konsumsi oleh masyarakat. Kemampuan konsumsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli yang tercermin dari tingkat pendapatan masyarakat, mengingat barang ini adalah bahan kebutuhan pokok (*normal goods*) maka konsumsi akan meningkat jika pendapatan bertambah demikian pula sebaliknya (Mankiw N.G., 1998 hal. 77). Soesila dan Setiawan (2001) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan menambah konsumsi terhadap CPO melalui peningkatan permintaan terhadap produk dari industri hilirnya dalam hal ini minyak goreng sawit. Penelitian serupa tentang pengaruh pendapatan terhadap konsumsi minyak nabati pernah dilakukan oleh Lorkipanidze, Epperson dan Ames (1996), penelitian tersebut berfokus kepada impor minyak kanola (*repeseed oil*) di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa impor minyak kanola di Amerika Serikat ditentukan tidak hanya oleh faktor ekonomis tetapi juga faktor non ekonomis, diantaranya ; harga minyak kanola sendiri, harga minyak nabati lainnya yang menjadi substitusinya, tingkat pendapatan bersih, nilai tukar dollar Kanada terhadap dollar Amerika Serikat serta faktor tren dan musim.

b. Pembentukan Persamaan Produksi Minyak Goreng Sawit.

Produksi minyak goreng sawit sangat erat hubungannya dengan ketersediaan suplai bahan baku yaitu CPO. Menurut Infordev (1997), dari setiap 1000 ton CPO dapat menghasilkan rata-rata 730 ton minyak goreng sawit atau dengan kata lain CPO memiliki rendemen rata-rata sebesar 73 %. Ketersediaan CPO di dalam negeri sangat tergantung dari perkembangan harga CPO baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Jika harga CPO di pasar internasional meningkat maka jumlah CPO yang diekspor akan meningkat dan CPO yang tersedia di pasar domestik untuk bahan baku minyak goreng menjadi berkurang. Kemampuan produksi minyak goreng sawit juga sangat erat hubungannya dengan penyediaan sarana pengolahan, di mana sarana tersebut terkait langsung dengan investasi jangka panjang dari pemilik modal, oleh karena

itu maka faktor tingkat suku bunga juga turut dalam variabel penentu produksi minyak goreng sawit (Amang, 1996), sebagaimana dalam persamaan berikut :

$$P_{MG} = c_{20} + c_{21} HD_{CPO} + c_{22} H_{MG} + c_{23} IR + c_{24} X_{CPO} + u_1$$

dimana,

P_{MG} = Produksi minyak goreng sawit

H_{MG} = Harga minyak goreng sawit

HD_{CPO} = Harga CPO di dalam negeri

IR = Interes rate (suku bunga kredit)

X_{CPO} = Volume CPO yang diekspor

Djaenuddin & Goenarsyah (2002 hal 43), menyatakan bahwa produksi minyak goreng sawit di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga CPO di pasar domestik walaupun dalam jangka pendek pengaruh tersebut tidak terlalu sensitif tetapi akan memberikan efek dalam jangka panjang. Karena harga merupakan suatu indikator yang dapat mempengaruhi perilaku produsen dalam memproduksi suatu barang. Demikian pula perubahan harga minyak goreng pengaruhnya terhadap produksi minyak goreng sawit akan memberikan respon dalam jangka panjang. Perubahan jumlah produksi akibat dari perubahan harga akan berlangsung dalam waktu agak lama karena akan terkait dengan penyediaan kapasitas sarana produksi dan penyediaan bahan baku. Pengaruh harga CPO di pasar internasional terhadap produksi minyak goreng sawit bersifat kurang responsif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini diduga berkaitan erat dengan telah terintegrasinya sebagian besar produsen minyak goreng sawit dengan perkebunan kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku.

c. Pembentukan Persamaan untuk Ekspor CPO.

Indonesia sebagai produsen utama CPO di dunia dimana pada tahun 2006 mengekspor CPO ke pasar internasional sebanyak 12,1 juta ton atau (40,3

%) dari total CPO yang diperdagangkan di dunia (30 juta ton). Harga CPO di pasar internasional ditentukan melalui mekanisme pasar yang merupakan interaksi dari suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, Indonesia melakukan pengontrolan volume CPO yang akan diekspor dengan memberlakukan pajak ekspor. Selain itu ekspor CPO juga terkait dengan kondisi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pada posisi mata uang domestik melemah maka harga CPO dalam mata uang asing cenderung menguat sehingga produsen melakukan ekspor CPO ke pasar internasional (Munadi E, 2007). Dari sisi permintaan, permintaan CPO cenderung meningkat akibat dari penurunan produksi barang substitusinya (minyak kedelai, minyak matahari dan minyak lobak) serta meningkatnya harga BBM, (Mankiw N.G.,1998 hal. 78). Maka dengan demikian volume ekspor CPO dapat dibuat persamaan berikut:

$$X_{CPO} = c_{30} + c_{31} TX_{CPO} + c_{32} HX_{CPO} + c_{33} ER + u_1$$

dimana,

X_{CPO} = Volume CPO ekspor

TX_{CPO} = Pajak Ekspor CPO

HX_{CPO} = Harga CPO di pasar internasional

ER = Exchange Rate (Nilai Tukar Rupiah)

Penerapan pajak ekspor terhadap CPO yang diekspor menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup signifikan antara harga CPO asal Indonesia dengan harga CPO dari negara produsen lainnya seperti Malaysia sehingga harga CPO Indonesia tidak kompetitif di pasar internasional. Untuk mampu bersaing maka pelaku pasar (produsen dan trader) melakukan pembebanan pajak ekspor kepada TBS yang biasanya berasal dari perkebunan rakyat, sehingga dengan demikian petani juga ikut menanggung pajak ekspor (Syafaat N, *et.al*, 2005). Pajak ekspor akan memberikan keuntungan kepada konsumen di dalam negeri karena dampaknya akan mengurangi penjualan CPO ke pasar internasional, dan

tidak ada pesaing bagi kompetitor di pasar internasional dan sebaliknya akan merugikan produsen (khususnya petani) di dalam negeri dan konsumen di luar negeri.

4.3 Hasil Identifikasi Persamaan Simultan

Proses identifikasi terhadap ketiga persamaan simultan memberikan indikasi bahwa ketiga persamaan tersebut memenuhi syarat perlu dan syarat cukup sebagaimana identifikasi model sebagai berikut :

$$H_{MG} = c_{10} + c_{11} P_{MG} + c_{12} C_{MG} + c_{13} PDB + u_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$P_{MG} = c_{20} + c_{21} HD_{CPO} + c_{22} H_{MG} + c_{23} IR + c_{24} X_{CPO} + u_1 \dots \dots \dots (2)$$

$$X_{CPO} = c_{30} + c_{31} TX_{CPO} + c_{32} HX_{CPO} + c_{33} ER + u_1 \dots \dots \dots (3)$$

Dari ketiga persamaan simultan di atas maka ada 7 variabel exogeneous atau variabel *predetermined*, yaitu Konsumsi minyak goreng sawit (C_{MG}), Pendapatan (PDB), Harga CPO di pasar domestik (HD_{CPO}), Tingkat suku bunga kredit (IR), Pajak Ekspor CPO (TX_{CPO}), Harga CPO di pasar internasional (HX_{CPO}) dan Nilai Tukar Rupiah (ER). Sedangkan variabel endogeneousnya adalah sebanyak 3 yaitu Harga Minyak Goreng (H_{MG}), Produksi minyak goreng (P_{MG}) dan Jumlah CPO yang diekspor (X_{CPO}).

Untuk memenuhi *order condition* maka dilakukan proses identifikasi sebagai berikut (Gujarati D.N., 2003 hal 747-750) :

1. Persamaan 1 tentang Harga minyak goreng sawit adalah *over identified* karena nilai $K = 7$ dan $k = 2$, sedangkan $m = 2$ maka $K - k > m - 1$.
2. Persamaan 2 tentang Produksi minyak goreng sawit adalah *over identified* karena nilai $K = 7$ dan $k = 2$, sedangkan $m = 3$ maka $K - k > m - 1$
3. Persamaan 3 tentang Volume ekspor CPO adalah *over identified* karena nilai $K = 7$ dan $k = 3$, sedangkan $m = 1$ maka $K - k > m - 1$

dimana,

K = banyaknya variabel exogeneous dalam model

k = banyaknya variabel exogeneous dalam persamaan

m = banyaknya variabel endogeneous dalam persamaan

Ketiga persamaan simultan yang dibentuk, dalam proses identifikasi menunjukkan *over identified*. Dengan demikian persamaan simultan tersebut dapat dilakukan estimasi terhadap angka koefisien dari masing-masing variabel dalam model melalui metoda *Two Stage Least Squares / 2 SLS* (Gujarati, D. N, 2003, hal 770).



BAB 5

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Ketiga persamaan simultan yang dibentuk sebagai model ekonometrika dalam penelitian ini, karena telah memenuhi syarat cukup dalam identifikasi maka dilakukan estimasi dengan metoda 2 SLS. Hasil pengolahan data dan pembahasan masing-masing persamaan beserta keterkaitan antar variabel di dalam persamaan dan antar persamaan dalam model akan dibahas sebagai berikut :

1. Persamaan Harga Minyak Goreng Sawit

Persamaan harga minyak goreng sawit terdiri atas variabel endogeneous yaitu harga minyak goreng (H_{MG}) dan variabel exogeneous yaitu konsumsi minyak goreng (C_{MG}), PDB dan produksi minyak goreng sawit (P_{MG}), variabel P_{MG} selanjutnya akan menjadi variabel endogeneous pada persamaan berikutnya. Hasil pengolahan data untuk persamaan 1 dapat dilihat pada lampiran 2, dengan model persamaan sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcccc}
 H_{MG} & = & 12904,11 & + & 0,0062 P_{MG} & + & 0,026 C_{MG} & - & 0,05 PDB \\
 se & = & (1166,301) & & (0,009707) & & (0,006659) & & (0,005785) \\
 t & = & (11,006413) & & (0,636960) & & (4,133385) & & (-8,586320) \\
 Prob & = & (0,000) & & (0,5247) & & (0,0000) & & (0,0000) \\
 & & & & R^2 = 0,819 & & d = 0,5569 & &
 \end{array}$$

Koefisien determinan (R^2) dari persamaan Harga Minyak Goreng Sawit sebesar 81,25 % yang berarti bahwa variabel produksi minyak goreng sawit, konsumsi minyak goreng sawit dan tingkat pendapatan masyarakat mampu menerangkan variabel dari harga minyak goreng sawit sebesar 81,25 %.

Besaran koefisien dari seluruh variabel sudah sesuai dengan keadaan ekonomi. Produksi dan konsumsi minyak goreng sawit berpengaruh positif terhadap tingkat perkembangan harga minyak goreng sawit tetapi produksi minyak goreng sawit tidak signifikan mempengaruhi harga minyak goreng sawit.

Konsumsi dan PDB sangat signifikan berpengaruh terhadap perkembangan harga minyak goreng sawit pada level $\alpha = 5\%$ tetapi untuk PDB berpengaruh negatif terhadap harga minyak goreng sawit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan produksi minyak goreng sawit 1 ton maka harga minyak goreng sawit akan bergerak naik sedikit yaitu Rp 0,0062/kg, oleh karena itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Di sisi lain setiap pertambahan konsumsi minyak goreng sawit sebanyak 1 ton atau dengan kata lain ada penambahan permintaan minyak goreng sawit maka akan diikuti dengan kenaikan harga minyak goreng sawit sebesar Rp 0,026/kg dan pengaruh ini sangat signifikan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Djaenuddin dan Gonarsyah (2002) bahwa harga minyak goreng sawit ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran minyak goreng sawit yang dalam penelitian ini permintaan diwakili oleh variabel konsumsi dan produksi minyak goreng sawit merupakan pencerminan dari penawaran.

Jika dibandingkan dengan tahun 1997-1998 saat terjadinya krisis moneter dan beberapa tahun setelah itu dengan tahun 2004-2006, pertumbuhan konsumsi minyak goreng sawit relatif lebih tinggi karena tingkat pendapatan masyarakat sudah mulai berangsur-angsur pulih. Namun demikian meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat tidak mendorong kenaikan harga minyak goreng sawit. Tingkat pendapatan penduduk pada kurun waktu 10 tahun terakhir (1997-2006) hanya mengalami peningkatan hingga US \$ 100 atau rata-rata US \$ 10 / tahun, suatu angka yang relatif rendah untuk meningkatkan daya beli khususnya untuk kebutuhan yang tidak terlalu pokok.

2. Persamaan Produksi Minyak Goreng Sawit

Persamaan produksi minyak goreng sawit terdiri atas variabel endogenous yaitu produksi minyak goreng sawit (P_{MG}) dan variabel exogenous yaitu harga CPO dalam negeri (HD_{CPO}), Interest rate atau tingkat suku bunga (IR), harga minyak goreng sawit (H_{MG}) dan ekspor CPO (X_{CPO}), selanjutnya variabel X_{CPO} akan menjadi variabel endogeneous pada persamaan berikutnya. Hasil

pengolahan data dari persamaan produksi minyak goreng sawit dapat dilihat pada lampiran 2.

$$\begin{array}{r}
 P_{MG} = 182767,9 - 1,9 HD_{CPO} + 17,53 H_{MG} - 1320,8 IR + 0,00017 X_{CPO} \\
 se = (32433,05) \quad (11,44091) \quad (7,103397) \quad (1165,161) \quad (5,33E-05) \\
 t = (5.635237) \quad (-0.167930) \quad (2.467675) \quad (-1.133614) \quad (3.107161) \\
 Prob = (3.107161) \quad (0.8668) \quad (0.0142) \quad (0.2580) \quad (0.0021) \\
 R^2 = 0,590786 \quad d = 0.432818
 \end{array}$$

Persamaan Produksi Minyak Goreng Sawit mempunyai angka koefisien determinan sebesar 57,20 %, hal ini menunjukkan bahwa variabel harga CPO domestik, harga minyak goreng sawit, tingkat suku bunga kredit investasi dan jumlah ekspor CPO secara bersama-sama hanya mampu menerangkan variabel produksi minyak goreng sawit sebesar 57,20 %. Atau dengan kata lain masih ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan yang mempengaruhi tingkat produksi minyak goreng sawit.

Tanda besaran koefisien dari masing-masing variabel sudah sesuai dengan keadaan ekonomi. Harga minyak goreng sawit dan jumlah ekspor CPO sangat signifikan mempengaruhi produksi minyak goreng sawit pada level $\alpha = 5$ %, kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat produksi minyak goreng sawit

Pada hasil penelitian dari persamaan produksi minyak goreng sawit setiap kenaikan harga CPO di pasar domestik Rp 1/kg maka akan mempengaruhi penurunan produksi minyak goreng sawit sebanyak 1,9 ton. Demikian pula setiap kenaikan harga minyak goreng sawit Rp 1/kg maka produksi minyak goreng sawit akan bertambah atau naik 17,53 ton. Sedangkan jika interest rate naik 1 % maka produksi minyak goreng sawit akan menurun atau berkurang sebanyak 1320,8 ton. Pengaruh ekspor CPO terhadap tingkat produksi minyak goreng sawit dalam negeri pada penelitian ini adalah jika ekspor meningkat sebanyak 1 ton maka pengaruhnya relatif kecil dan hanya meningkatkan produksi sebanyak 0,00017 ton.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djaenuddin dan Gonarsyah (2002) bahwa produksi minyak goreng sawit sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya harga minyak goreng sawit. Produsen memproduksi minyak goreng sawit karena harga minyak goreng sawit dapat memberikan indikator yang dapat mempengaruhi perilaku produsen untuk mengatur produksinya. Pengaruh harga akan terlihat dalam jangka panjang karena terkait dengan penyediaan sarana dan persediaan bahan baku.

Sedangkan harga domestik CPO dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap produksi minyak goreng sawit namun pengaruhnya tidak signifikan. Kenaikan harga CPO di pasar domestik menyebabkan penurunan produksi minyak goreng sawit karena CPO sebagai bahan baku bagi industri pengolahan dan pada akhirnya akan kekurangan produksi minyak goreng sawit dan selanjutnya menyebabkan kenaikan harga minyak goreng sawit. Kenaikan harga CPO domestik biasanya dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar internasional, karena pasar CPO sangat terintegrasi sehingga perubahan harga di pasar internasional cenderung mempengaruhi harga di pasar domestik.

Sementara tingkat suku bunga kredit perbankan, dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha di industri pengolahan akan mengurangi pembelian bahan baku atau perluasan kapasitas produksi untuk peningkatan produksi akibat dari peningkatan suku bunga kredit investasi. Atau pelaku usaha dalam industri pengolahan minyak goreng kelapa sawit akan memperhitungkan tingkat suku bunga kredit investasi pada saat akan memasuki bidang usaha pengolahan kelapa sawit. Tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi, jika tingkat suku bunga relatif rendah maka investor akan menanamkan modalnya pada sektor riil termasuk usaha produksi minyak goreng sawit sebagai investasi jangka panjang dan sebaliknya jika tingkat suku bunga perbankan relatif besar maka investor ada kecenderungan menempatkan dananya pada industri perbankan (Rahardja, 2005). Suku bunga perbankan merupakan paket kebijakan moneter yang diperuntukkan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam rangka mengatur kondisi ekonomi makro ke arah yang diinginkan pemerintah (Mankiw, 2003).

3. Persamaan Ekspor CPO

Persamaan ekspor CPO terdiri dari variabel endogeneous yaitu ekspor CPO (X_{CPO}) dan beberapa variabel exogeneous yaitu, pajak ekspor (TX), harga CPO di pasar internasional (HX_{CPO}) dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (ER). Model persamaan ekspor CPO yaitu :

$$X_{CPO} = 4.07E+08 - 5331701 TX_{CPO} - 286271.8 HX_{CPO} + 17153.65 ER$$

se	=	(3.637107)	(1321272)	(-1.665495)	(7967.591)
t	=	(3.637107)	(4.035278)	(-1.665495)	(2.152929)
Prob	=	(0.0003)	(0.0001)	(0.0970)	(0.0970)
R^2	=	0,332796		d = 0,651469	

Angka koefisien determinan (R^2) pada persamaan ekspor CPO adalah 31 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak ekspor, harga CPO di pasar internasional dan nilai tukar mata uang rupiah hanya mampu menerangkan variabel dari ekspor CPO dalam persamaan simultan hingga 31 %.

Secara ekonomi tanda besaran masing-masing angka koefisien dari seluruh variabel sudah memenuhi persyaratan atau kondisi ekonomi. Ketiga variabel tersebut sangat signifikan mempengaruhi ekspor CPO, pada level $\alpha = 5\%$ untuk pajak ekspor dan nilai tukar mata uang rupiah, dan untuk harga CPO di pasar international pada level $\alpha = 10\%$.

Pada penelitian ini pajak ekspor sangat signifikan mempengaruhi volume ekspor CPO dengan kata lain setiap kenaikan pajak ekspor 1 % maka akan berdampak terhadap penurunan volume ekspor CPO hingga 533 ribu ton. Sedangkan dampak dari pengaruh harga CPO di pasar internasional terhadap volume ekspor CPO, setiap kenaikan harga CPO sebesar US \$ 1/MT maka akan menyebabkan penurunan 286 ton. Penurunan jumlah ekspor tersebut pada tingkat harga yang optimum disebabkan sebagai dampak dari penerapan pajak ekspor karena dalam penetapan pajak ekspor akan berpatokan kepada tingkat harga transaksi di pasar internasional. Pengaruh exchange rate terhadap volume ekspor CPO adalah sangat signifikan meningkatkan jumlah ekspor, setiap pertambahan kenaikan nilai tukar Rp 1/1 US \$ atau jika nilai rupiah melemah setiap Rp 1/1 US \$ maka akan meningkatkan volume ekspor CPO sebanyak 1,7 ton.

Pajak ekspor akan berpengaruh negatif terhadap tingkat volume ekspor CPO, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syafaat *et al* (2005) dimana dengan penerapan pajak ekspor terhadap CPO akan menyebabkan terjadinya disparitas harga antara CPO asal Indonesia dengan CPO dari negara pesaing sehingga harga CPO asal Indonesia tidak kompetitif. Dampaknya adalah akan mengurangi volume ekspor CPO ke pasar internasional.

Kebijakan pajak ekspor oleh Sugema *et al* (2007) dampaknya akan menurunkan pangsa ekspor akibat menurunnya daya saing industri karena terjadinya disparitas harga CPO dengan negara pesaing yang tidak menerapkan pajak ekspor. Di dalam negeri dampak yang paling langsung akan terlihat adalah berupa penurunan harga CPO di tingkat domestik. Dengan asumsi bahwa harga di pasaran internasional bersifat kompetitif, setiap kenaikan pajak ekspor secara langsung akan diterjemahkan menjadi lebih rendahnya harga domestik dibanding harga referensi di pasar internasional. Artinya terjadi disparitas antara harga internasional dengan harga CPO domestik. Selanjutnya Sugema *et al* (2007) menyatakan bahwa produsen CPO yang bahan bakunya (TBS) dipasok dari petani akibat pembebanan pajak ekspor, akan mentransmisikan beban tersebut kepada petani dengan menekan harga TBS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Reed (2001), setiap satu persen penurunan harga CPO di pasaran dunia akan diterjemahkan menjadi penurunan harga di tingkat petani sebesar 12 persen. Artinya kerugian yang ditanggung oleh petani akibat pembebanan pajak ekspor lebih besar dibanding produsen (pabrik) CPO.

Hal ini bisa terjadi karena ketidaksimetrisan daya tawar antara petani sawit dengan pabrik pengolahan CPO dimana petani sawit mempunyai posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual TBS dan di sisi lain pabrik pengolahan CPO memiliki posisi tawar yang jauh lebih baik karena mereka bertindak sebagai monopsoni atau setidaknya oligopsoni.

Selanjutnya Arifin (2004), menegaskan bahwa penerapan pajak ekspor adalah kebijakan yang sangat distortif, karena struktur pasar minyak goreng sawit di dalam negeri adalah sangat monopolistik atau oligopolistik. Pergerakan

harga eceran minyak goreng sawit tidak ditentukan oleh mekanisme pasar persaingan sempurna, melainkan oleh kekuatan dan penguasaan pangsa pasar dan pangsa distribusi serta faktor psikologis dan kepanikan konsumen. Selanjutnya Arifin mengatakan pangsa pasar minyak goreng sawit di Indonesia dikuasai sekitar 60 % sampai 65 % oleh kelompok perusahaan besar yakni Kelompok Salim dan Kelompok Sinar Mas yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir (integrasi vertikal) dari perkebunan, pengolahan CPO, industri minyak goreng sampai kepada pemasaran minyak goreng itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini teramat sulit untuk mengharapkan berbagai macam kebijakan bekerja secara efektif untuk mempengaruhi harga minyak goreng di dalam negeri, termasuk kebijakan pajak ekspor.

Sementara Soesila dan Setiawan (2001), menyatakan bahwa dampak dari kebijakan penerapan pajak ekspor terhadap CPO adalah akan menghambat pertumbuhan investasi, produksi dan ekspor CPO serta menurunkan tingkat penghasilan petani. Namun di lain pihak kebijakan pajak ekspor ini sangat efektif mengontrol CPO domestik untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan minyak goreng sawit. Safaat N. *et al* (2005) menyatakan bahwa dengan penerapan pajak ekspor maka akan berdampak pada penurunan produk domestik bruto, penurunan daya saing CPO Indonesia dibanding CPO Malaysia, penurunan kinerja agribisnis kelapa sawit dan terjadi penurunan pendapatan petani.

Munadi (2007), menyatakan bahwa permintaan ekspor kelapa sawit merupakan permintaan turunan, karena CPO merupakan bahan baku dari minyak goreng sawit yang harganya sangat tergantung kepada harga bahan bakunya. Harga CPO di pasar internasional yang sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh jumlah permintaan dari konsumen, harga barang substitusinya seperti harga minyak nabati lainnya, tingkat pendapatan negara importir, jumlah suplai dari negara pesaing seperti Malaysia.

Harga CPO di pasar internasional akan berpengaruh negatif terhadap jumlah ekspor CPO. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor CPO mentah relatif lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Sementara permintaan konsumen di pasar internasional lebih banyak di dominasi

untuk keperluan bahan baku antara untuk industri pangan dan non pangan, dan untuk kebutuhan CPO derivat ini lebih banyak dipenuhi oleh Malaysia. Harga CPO di pasar internasional juga cenderung dipengaruhi oleh kondisi non ekonomi seperti terjadi krisis politik di negara-negara penghasil minyak mentah (crude oil), isu peperangan dan beberapa isu pengrusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan kebutuhan CPO mentah untuk konsumen di pasar internasional lebih banyak dipenuhi dari Indonesia. Karena kebutuhan konsumen internasional relatif terbatas hanya dipakai sebagai bahan bakar biodiesel atau berfungsi sebagai bahan substitusi maka dengan kenaikan harga CPO menyebabkan konsumen akan beralih kepada bahan substitusi CPO seperti minyak kanola atau bahan bakar minyak fosil dan selanjutnya dalam jangka panjang akan mempengaruhi penurunan jumlah ekspor CPO.

Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat sangat signifikan mempengaruhi jumlah ekspor CPO pada level $\alpha = 5\%$. Pengaruh nilai tukar mata uang tersebut positif terhadap jumlah CPO yang diekspor. Dengan kata lain semakin menurun nilai rupiah terhadap mata uang asing (US \$) atau mata uang rupiah terdepresiasi maka akan menyebabkan volume ekspor CPO meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Munadi (2005), yang menyatakan bahwa jika mata uang rupiah cenderung melemah terhadap mata uang asing maka harga CPO dalam mata uang asing akan menguat, dengan demikian produsen akan melakukan penjualan CPO ke pasar internasional dalam upaya mengejar devisa negara. Demikian pula penelitian Lorkipanidze, Epperson dan Ames (1996), penelitian tersebut berfokus kepada impor minyak kanola (*repeseed oil*) di Amerika Serikat dari Kanada. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa impor minyak kanola di Amerika Serikat ditentukan tidak hanya oleh faktor ekonomis tetapi juga faktor non ekonomis, diantaranya ; harga minyak kanola sendiri, tingkat pendapatan bersih, nilai tukar dollar Kanada terhadap dollar Amerika Serikat serta faktor tren dan musim.

BAB 6

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Fluktuasi harga minyak goreng sawit di dalam negeri pada kurun waktu 10 tahun terakhir (1997-2006) dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor-faktor tersebut pengaruhnya dapat bersifat langsung kepada industri minyak goreng sawit dan bersifat tidak langsung atau melalui pengaruh terhadap bahan baku minyak goreng sawit yaitu CPO.

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan memberikan rekomendasi jika ada pihak yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang atau bila pemangku kepentingan (*stake holders*) akan memanfaatkan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Harga minyak goreng sawit di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, semakin tinggi konsumsi maka harga minyak goreng sawit juga cenderung untuk naik. Kenaikan harga akibat tekanan permintaan disebut *demand pull inflation*.
2. Tingkat produksi minyak goreng sawit tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga minyak goreng sawit karena tingkat produksi dalam jangka pendek tidak langsung meningkatkan suplai ke pasar, namun dalam jangka panjang akan menjadi stok yang siap dipasok ke pasar sehingga pengaruhnya akan terlihat setelah beberapa jangka waktu kemudian.
3. Produksi minyak goreng sawit di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga minyak goreng sawit itu sendiri serta jumlah CPO yang diekspor. Harga minyak goreng sawit dan jumlah CPO yang diekspor merupakan indikator dari interaksi antara permintaan dan suplai.
4. Tingkat suku bunga perbankan dan harga CPO di pasar domestik berpengaruh negatif terhadap tingkat produksi minyak goreng sawit, namun pengaruhnya tidak signifikan.

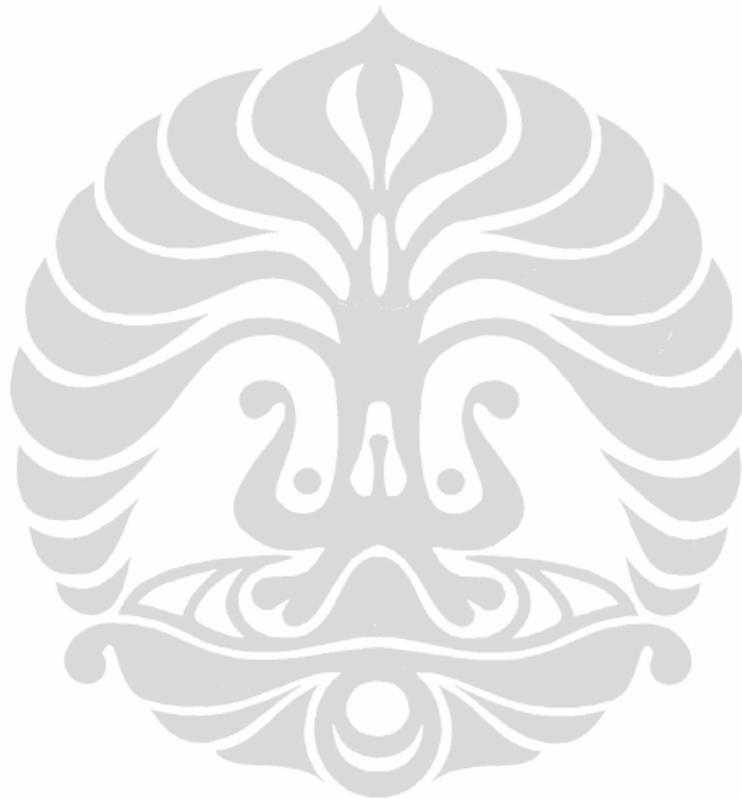
5. Pajak ekspor sangat signifikan mempengaruhi penurunan volume ekspor CPO demikian pula harga CPO di pasar internasional sangat signifikan pengaruhnya dalam menurunkan jumlah ekspor CPO ke pasar internasional.
6. Pengaruh nilai tukar mata uang rupiah berdampak positif terhadap jumlah ekspor CPO. Jumlah CPO yang diekspor akan meningkat pada saat nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika (nilai tukar melemah).
7. Indonesia sebagai produsen utama CPO di dunia, sejak tahun 2006 sudah berhasil melampaui jumlah produksi CPO Malaysia, namun dalam penjualan ke pasar ekspor Malaysia masih unggul dan terlebih lagi Malaysia menjual komposisi CPO derivat lebih tinggi (80 %) dibandingkan dengan CPO asalan (20 %). Indonesia melakukan ekspor CPO derivat lebih kecil (40 %) dan CPO asalan (60 %).

B. Rekomendasi

1. Pemangku kepentingan seyogianya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan pengaruh fluktuasi harga CPO di luar negeri terhadap harga minyak goreng sawit di dalam negeri mengingat CPO sebagai bahan baku minyak goreng permintaannya cenderung meningkat dibandingkan dengan minyak nabati lainnya baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.
2. Pajak ekspor sebagai instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi pengembangan industri hilir di dalam negeri perlu dikaji lebih komprehensif oleh pengambil kebijakan mengingat beberapa analisis atau kajian terdahulu termasuk kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pajak ekspor terhadap CPO ekspor cenderung mendistorsi pasar.
3. Kebijakan yang dapat mendorong pengembangan industri hilir hendaknya tidak parsial atau *ad hoc* yang sifatnya hanya jangka pendek untuk itu maka orientasi kebijakan hendaknya berpihak kepada kepentingan seluruh

pelaku usaha dan terlebih kepada struktur pelaku usaha yang paling hulu yaitu petani kelapa sawit.

4. Industri kelapa sawit yang mempunyai keunggulan kompetitif bagi bangsa Indonesia, hendaknya disikapi oleh segenap pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk lebih mendorong ke arah pengembangan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga industri tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang optimum.



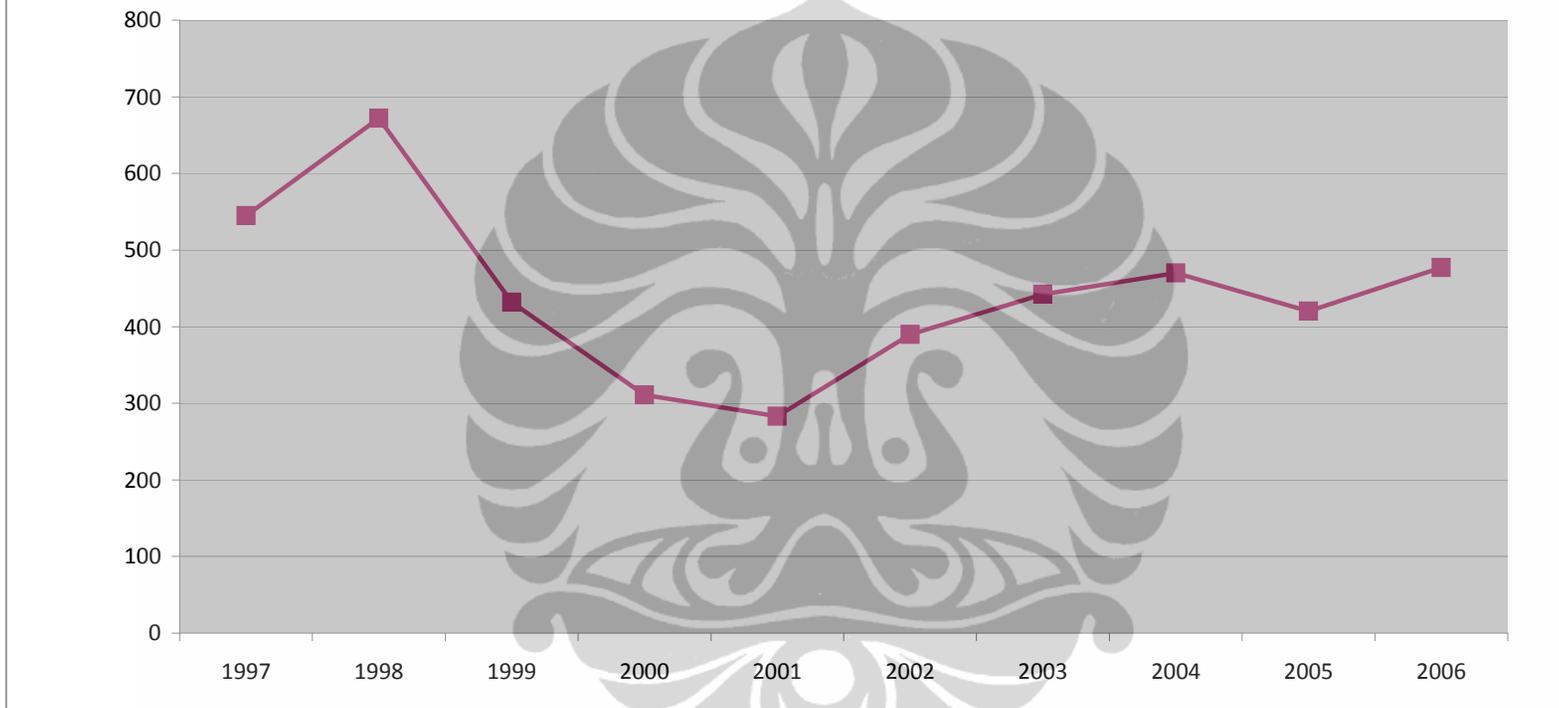
DAFTAR PUSTAKA

- Amang *et al*, 1996. Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press. Bogor. hal 1-36
- Arifin B., 2004. Agro Industri Minyak Sawit : “Inkonsistensi dan Distorsi, dalam: Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia”. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 180-196
- Azahari D.H. 2005, Diversifikasi Produk dan Pengembangan Infrastruktur Kelapa Sawit, dalam: Chandra Aditiawan dan Widyani Vicky, “Prediksi & Rekomendasi Revitalisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia sebagai Andalan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2010-2020”, Jakarta, PT. ISMaC Indonesia, hal. 59-73.
- Bangun D., 2005. Peta Terkini Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit, dalam : Chandra Aditiawan, dan Widyani Vicky, “Prediksi & Rekomendasi Revitalisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia sebagai Andalan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2010-2020”, 2005, Jakarta, PT. ISMaC Indonesia, hal. 36-49.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Volume Ekspor dan Impor CPO dan Produk Turunannya. Jakarta.
- Basri F, 2007. Analisis Ekonomi : Karut-Marut Tata Niaga. Kompas 3 Juni 2007. Uni Sosial Demokrat, <http://www.unisosdem.org>.
- Brodjonegoro B.P.S. 2005. Politik Ekonomi: Antara Liberalisasi vs Proteksi pada Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia, dalam: Chandra Aditiawan, dan Widyani Vicky, “Prediksi & Rekomendasi Revitalisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia sebagai Andalan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2010-2020”, 2005, Jakarta, PT. ISMaC Indonesia, hal. 87-110.
- Darmawati A, 2004. Insentif yang Mendongkrak Ekspor CPO Malaysia. BEI News Edisi 20 Tahun V, Mei-Juni 2004.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2008. Statistik Perkebunan, Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Departemen Keuangan, 1997. Keputusan Menteri Keuangan No. KMK 300/KMK.01/1997 Tentang Perubahan Tarif Pajak Ekspor atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD CPO), Crude Olein & Refined Bleached, Deodorized Olein (RBD Olein). Depkeu, Jakarta.
- Departemen Keuangan, 1997. “Keputusan Menteri Keuangan No. KMK 334/KMK.01/1998 Tentang Besarnya Tarif & Tatacara Penyetoran Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu”. Depkeu, Jakarta.
- Departemen Keuangan, 2000. Keputusan Menteri Keuangan No. No. 387/KMK 017/2000 tentang Penetapan Tarif Pajak Pajak Ekspor CPO dan Produk Turunannya. Depkeu, Jakarta.

- Departemen Keuangan, 2001. Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK J017/2001 Tentang Penetapan Tarif Pajak Ekspor CPO dan Produk Turunannya. Depkeu, Jakarta.
- Departemen Keuangan, 2005. Keputusan Menteri Keuangan No. RI No 92/PMK 02/2005 tentang Penetapan Pajak Ekspor CPO dan Produk Turunannya. Depkeu, Jakarta.
- Djaenudin R.D dan Gonarsyah I., 2002 Analisis Pasar Domestik Minyak Goreng: Dampak Kebijakan Pemerintah dan Kemungkinan Diberlakukannya Liberalisasi Perdagangan, dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol.XLX No. 1- 2002, Jakarta, LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 19-78.
- Gandolfo G., 1998. *International Trade Theory and Policy*, Berlin Springer Verlag, Germany.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. McGraw Hill.
- Hendrati IM, 1997. Pengaruh Kebijakan Perdagangan dalam Ekspor CPO Indonesia 1972-1995, Tesis Program Pasca Sarjana, Bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Perencanaan, Jakarta.
- Indonesia Palm Oil Board, 2007. *Indonesia Palm Oil Statistics 2006*. IPOB, Jakarta.
- Indonesia Palm Oil Board, 2008. *Indonesia Palm Oil Statistics 2007*. IPOB, Jakarta.
- Info Pasar Olein : Jakarta Futures Exchange, 9 Oktober 2007 <<http://www.bbj-jfx.com/products.asp?pmo?>>
- Infordev, 1997. Studi tentang Industri Minyak Sawit (CPO) dan Industri Hilirnya. Jakarta.
- James R. Markusen, et al., 1995. *International Trade, Theory and Evidence*. New York: McGraw Hill.
- Kadiman K., "Biodiesel Sebagai Alternatif Energi Prospektif", dalam: Chandra Aditiawan, dan Widayani Vicky, "Pridiksi & Rekomendasi Revitalisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia sebagai Andalan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2010-2020", Jakarta, PT. ISMaC Indonesia, hal 116-128.
- Kantor Pemasaran Bersama, 2008. Harga CPO Domestik dan Harga CPO di Pasar Rotterdam. PT. Perkebunan Nusantara, Jakarta.
- Krugman P.R. and Obstfeld M., 2003. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*", Edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krugman P.R. and Obstfeld M., 2004. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*, edisi kelima., PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA, Jakarta.
- Lingga H, Nasution T. 9 Maret 1998. Kembali ke Penguasa Awal. *Warta Ekonomi* 42 hal 57.

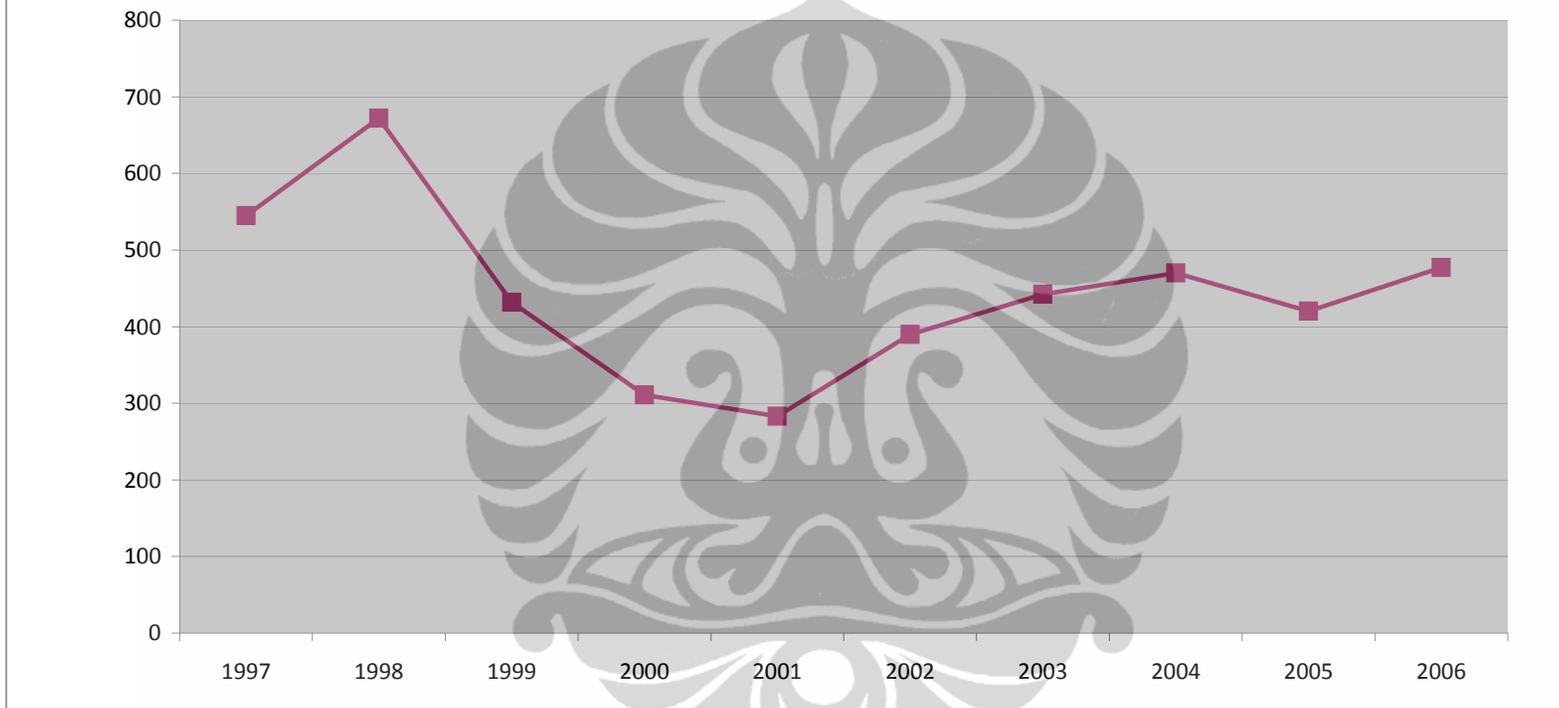
- Lorkipanidze N et al. 1996. An Economic Analysis of Import Demand for Canola Oil in the United State. Februari 2006. SSRN: <http://ssrn.com/abstract=61108>
- Mankiw N.G, 2003. Teori Makro Ekonomi Edisi kelima. Harvard University.
- Munadi E. 2007. Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya Terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India (Pendekatan *Error Correction Model*). Warta Informatika Pertanian: Vol. 16 No. 2, 2007.
- Naibaho P.M., 2003 Pabrik Kelapa Sawit, dalam : Buana *et. al.*, Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Sumatera Utara.
- Pahan I., 2007. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Perum BULOG, 2008. Rekapitulasi Harga Minyak Goreng. Divisi Harga Dasar.
- Pindyck R.S. and Rubinfeld D.L., 2001. *Microeconomics, 5th edition*, New Jersey Prentice Hall, Inc..
- Parningotan, F.S. 2007. International Trade as an Engine of Economic Growth. www.perbanasinstitute.ac.id
- Porter M.E., 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press A Division of Macmillan, Inc, New York.
- Rahardja P & Manurung M. (2005). Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syafaat N *et al*, 2005. Analisa Dampak Penerapan Ekspor CPO Terhadap Kinerja Agribisnis Kelapa Sawit dan Pendapatan Petani. Anjak Pertanian: Vol. 6 No. 8, 2005. pse.litbang.deptan.go.id.
- Salvatore D., 2004. *International Economics, 8th ed.* Jhon Wiley & Sons, Inc..
- Salya D.H., 2006. Rekayasa Model Sisitim Deteksi Dini Perniagaan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Disertasi). Bogor. Sekolah Pasaca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Soesila W. & Setiawan D., 2001. Dampak Pajak Ekspor CPO Terhadap Beberapa Aspek Industri CPO Indonesia : Simulasi Model Ekonometrik. dalam *Socio-Economic of Agriculture & Agribusiness* Vol. 1 No 2 Juli 2001 <http://ejournal.unud.ac.id>.
- Sugema *et al*, 2007. Strategi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit. INDEF, Jakarta.
- Tarmidi 2000. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Internasional, dalam: Refrizon, Dampak Perkembangan Perdagangan Internasional. <http://astarizon.org>.

Lampiran : 11
Grafik Harga Rata-Rata CPO Ekspor, 1997-2006
(US \$/MT)



Sumber : Kantor Pemasaran Bersama Jakarta , 2007 (diolah)

Lampiran : 11
Grafik Harga Rata-Rata CPO Ekspor, 1997-2006
(US \$/MT)



Sumber : Kantor Pemasaran Bersama Jakarta , 2007 (diolah)

Lampiran : 2
Hasil Pengolahan Data Persamaan Simultan

System: SIMULTAN1
 Estimation Method: Two-Stage Least Squares
 Date: 01/03/09 Time: 03:41
 Sample: 1997:01 2006:12
 Included observations: 120
 Total system (balanced) observations 306

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	12904.11	1166.301	11.06413	0.0000
C(2)	0.006183	0.009707	0.636960	0.5247
C(3)	0.027525	0.006659	4.133385	0.0000
C(4)	-0.049675	0.005785	-8.586320	0.0000
C(5)	182767.9	32433.05	5.635237	0.0000
C(6)	-1.921267	11.44091	-0.167930	0.8668
C(7)	17.52888	7.103397	2.467675	0.0142
C(8)	-1320.843	1165.161	-1.133614	0.2580
C(9)	0.000166	5.33E-05	3.107161	0.0021
C(10)	4.07E+08	1.12E+08	3.637107	0.0003
C(11)	-5331701.	1321272.	-4.035278	0.0001
C(12)	-286271.8	171883.9	-1.665495	0.0970
C(13)	17153.65	7967.591	2.152929	0.0322

Determinant residual covariance 6.42E+30

Equation: $HMG = C(1) + C(2)*PMG + C(3)*CMG + C(4)*PDB$

Instruments: CMG PDB HDCPO IR TX HXCPO ER C

Observations: 92

R-squared	0.818704	Mean dependent var	4003.702
Adjusted R-squared	0.812524	S.D. dependent var	1241.340
S.E. of regression	537.4819	Sum squared resid	25422036
Durbin-Watson stat	0.556847		

Equation: $PMG = C(5) + C(6)*HDCPO + C(7)*HMG + C(8)*IR + C(9)*XCPO$

Instruments: CMG PDB HDCPO IR TX HXCPO ER C

Observations: 92

R-squared	0.590786	Mean dependent var	280273.8
Adjusted R-squared	0.571972	S.D. dependent var	51185.62
S.E. of regression	33487.62	Sum squared resid	9.76E+10
Durbin-Watson stat	0.432818		

Equation: $XCPO = C(10) + C(11)*TX + C(12)*HXCPO + C(13)*ER$

Instruments: CMG PDB HDCPO IR TX HXCPO ER C

Observations: 92

R-squared	0.332796	Mean dependent var	3.66E+08
Adjusted R-squared	0.310051	S.D. dependent var	2.06E+08
S.E. of regression	1.71E+08	Sum squared resid	2.58E+18
Durbin-Watson stat	0.651469		

UCAPAN TERIMA KASIH

Riwayat perjalanan hidup yang tak akan pernah terlupakan dalam benak penulis adalah kembali menjadi bagian dari komunitas ilmiah dari sebuah perguruan tinggi ternama di tanah air, setelah hampir dua dasawarsa lepas dari “Kampus Rakyat” Institut Pertanian Bogor. Sungguh tidak mudah melakukan adaptasi mulai dari pengaturan jadwal akademik di tengah kesibukan dengan tugas rutin sebagai karyawan BUMN, sampai kepada mengubah pola pikir (*mind set*) yang berlatar belakang keilmuan yang sangat berbeda dengan program studi baru yakni ilmu ekonomi.

Jadi sangat pantas apabila berbagai kalangan telah banyak membantu penulis mulai dari seluruh rangkain proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Atas budi baik yang telah dicurahkan berbagai pihak tersebut termasuk sahabat, kerabat dan teman sejawat, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai iringan doa semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan tersebut.

1. Bapak Prof. Dr. Lepi T. Tarmidi, atas kesungguhan dan kesabaran beliau membimbing penulis semenjak perkuliahan sampai penyusunan, pengujian dan penyelesaian tesis.
2. Bapak Prof. Dr. Pos Hutabarat, atas bimbingan dan arahnya dalam pemilihan topik, penyusunan proposal dan pada saat seminar proposal tesis.
3. Bapak Dr. B. Raksaka Mahi dan Ibu Hera Susanti, SE. MSc, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi MPKP-FEUI, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Keluarga Besar Universitas Indonesia.
4. Bapak R.H. Achmadi, SE., M.Soc.Sc yang telah menguji penulis dalam ujian komprehensif dan ujian tesis serta Segenap Civitas Akademika Universitas Indonesia yang telah memberikan “sebagian kecil” ilmunya kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
5. Direksi Perum BULOG, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta kesempatan kepada penulis mulai dari proses perkuliahan hingga penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan akademik di Universitas Indonesia.

6. Bapak Dr. Mohammad Ismet, Bapak Ir. Abd. Waries Patiwiri MBA, Bapak Dr. P. Suharno, Bapak Ir. Agus Syaifullah MSc., Bapak Ir. Bambang Djanuardi MSc. dan Bapak Ir. Anang Thoyib, MSc. Atas dorongan dan bantuan beliau-beliau dalam mengasah, memperkaya pemikiran dan wawasan penulis selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan di MPKP khususnya angkatan XV B Sore Salemba yang selama ini menjadi partner “diskusi dan berdebat” dan telah banyak memberikan dorongan serta semangat juang yang seakan tidak pernah surut mulai dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini, terlebih seluruh kawan pada program kekhususan Ekonomi Globalisasi (Max Rori, ME, Boy Siregar, Ibnu Sina, Syaifudin, Jeng Wita, Fredy) dan rekan lainnya, Bapak Nursyam dan Mbak Nur Aisyah Amini ME.
8. Segenap bagian akademik MPKP FE-UI baik yang bermarkas di Salemba maupun di Depok, khususnya Mas Haris, Mas Dedi dan Mbak Irma yang selama penulis menjadi anggota Komunitas Kampus Salemba banyak membantu mulai dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman sejawat di Perum BULOG khususnya teman-teman di Divisi Perdagangan dan Divisi Industri, Ibu Lelly Pelitasari ME, Ibu Epi Sulandari ME, dan Bapak Ali Akhmad Nadji ME, yang selama ini banyak mendorong, memotivasi dan membantu penulis selama dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
10. Orang Tua H. Ismail Daeng Ngopa dan Alm. Hj. Syamsiah Daeng Kanang serta Adik-Adik di Takalar yang selama ini telah banyak mengilhami, memotivasi dan mendorong penulis dalam menempuh studi.
11. Keluarga besar Ayahanda Mertua Alm. H. Sandiwirya, Eyang Putri dan khususnya Mas-Mas & Mbak-Mbak serta Adik-Adik Ipar yang banyak mendorong, menyemangati dan bahkan mendoakan penulis selama ini.
12. Istri Ir. Daryati dan Ananda Fadhil Hary Baharuddin tercinta, yang telah banyak berkorban sebagai dampak dari pengurangan seluruh waktu, materi, dan kasih sayang sehingga terkadang harus banyak “mengalah” karena sebagian dari sumberdaya yang juga sangat terbatas “dikonsentrasikan” hanya untuk proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini.